



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**Nomor : 0106/KONTR-PENL/V/1438/2017**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua belas** bulan **Juli** tahun **Dua ribu Tujuh belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Dr.Ir.Abubakar Idhan, M.P.** : **Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar**, bertindak atas nama Rektor **Universitas Muhammadiyah Makassar** yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
  
- 2. Dr. Nuryanti Mustari, M.Si** : Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2017 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA..**

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi dosen perguruan tinggi Swasta Kopertis Wilayah IX Tahun Anggaran 2017, **Nomor : 1492/K9/KT.03/2017, tanggal 26 April 2017.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian *Produk Terapan* Tahun 2017 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

Kontrak penelitian ini berdasarkan kepada :

1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015, tentang Kementerian Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

9. Keputusan Presiden No 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementrian Dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Priode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 698/M/Kp/XII/2015, tentang Peaba Pebendaharaa Pada Direktorat Jenderal Penguata Riset Dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016, Tentang Cara Pembentukan Komite Penilaian dan /atau Reviewer Penelitian;
13. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28/E/KPT/2017 Tentag Penerimaan Pendanaan Penelitian;
14. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset da Pengembangan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 02/E.1/KPT/2017 tanggal 14 Januari 2017;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset Dan Pengabdian Masyarakat Nomor DIPA-042.06-0/2017;

## Pasal 2

**PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian *Produk Terapan* baru tahun 2017 dengan judul ” *Pengembangan Model Pemberdayaan Penyandang Disabilitaas Fisik Dalam Implementasi Program Reduce,Reuce,Recycle (3r) Melalui Bank Sampah Di Kota Makassar*”.

- 1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Pelaksanaan Penugasan Penelitian *Produk Terapan* tahun 2017 sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dari DIPA Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat Nomor **SP DIPA-042.06.1.401516/2017 TANGGAL 7 DESEMBER 2016**.

## Pasal 3

- 1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebesar *Rp. 67.000.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta rupiah)* yang berasal dari DIPA Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat Nomor **SP DIPA-042.06.1.401516/2017 TANGGAL 7 DESEMBER 2016**.
- 2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 67.000.000,- = \text{Rp. } 46.900.000,-$  (*Empat Puluh Enam juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 67.000.000,- = \text{Rp. } 20.100.000,-$  (*Dua Puluh juta Seatus Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** telah melakukan verivikasi selambat-lambatnya **tanggal 15 September 2017** atas kewajiban peneliti mengunggah ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
    - a. catatan harian pelaksanaan kegiatan
    - b. laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan.

- c. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersama dengan pembayaran tahap kedua dengan melampirkan daftar luaran penelitian yang sudah divalidasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

#### **Pasal 5**

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 6**

- 1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Hibah Penelitian berupa hak kekayaan intelektual lainnya serta publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1.
- 2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hak paten atau hak kekayaan intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir tahun anggaran berjalan.

#### **Pasal 7**

- 1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS paling lambat tanggal **15 September 2017** sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian Tahun 2017.
- 2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2017 sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 8**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

#### **Pasal 9**

- 1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada lama website SIMLITABMAS
  - c. Catatan harian dan laporan kompresip pelaksanaan penelitian, pada tanggal **30 Oktober 2017**
  - d. Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil, pada tanggal **31 Oktober 2017**.
- 2) Apabila dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dana atau terlambat mengirim laporan

Kemajuan dana atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikarenakan sanksi administrasi berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

- 3) Peneliti/Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30%.
- 4) Apabila dalam penelitian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak dicapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas Negara

#### **Pasal 10**

- 1) Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 9 ayat (1) ditulis dalam **format Font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (cover) ditulis.**

**Dibiayai oleh :**

**Direktorat riset dan pengabdian masyarakat  
Direktorat jenderal dan penguatan riset dan pengembangan  
Kementerian riset, teknologi, dan Pendidikan tinggi  
Sesuai dengan kontrak penelitian tahun anggaran 2017**

- 2) Softcopy laporan hasil penelitian program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus di unggah ke laman website SIMLITABMAS dengan hardcopy harus disimpan oleh **PIHAK KEDUA** dan disetor ke **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 11**

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan dipotong langsung oleh **PIHAK PERTAMA** yang harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
3. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
4. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
5. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

- 1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
- 2) Setiap publikasi, makalah dana tau ekspos dalam bentuk apapun berkaitan dengan hasl ini wajib mencantumkan Direktorat Riset Dan Pengabdian Masyarakat sebagai pemberi dana
- 3) Hasil penelitian berupa peralatan dana tau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui berita acara serah terima (BAST)
- 4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian **PARA PIHAK** melalui amandemen kontrak penelitian dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak penelitian ini.

### Pasal 13

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam perjanjian penugasan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan para pihak yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure)
- 2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam perjanjian penugasan ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade peledakan, sabotase, revolusin pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian penugasan ini
- 3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure) disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

### Pasal 14

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

### Pasal 15

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**Dr.Ir Abubakar Idhan, MP**



**Dr. Nuryanti Mustari, M.Si**

Kode/Rumpun Ilmu : 605/KEBIJAKAN PUBLIK

Bidang Fokus : SOSIAL HUMANIORA

# LAPORAN TAHUNAN

## PENELITIAN PRODUK TERAPAN



**PENGEMBANGAN MODEL PEMBERDAYAAN PENYANDANG  
DISABILITAS FISIK dalam IMPLEMENTASI PROGRAM *REDUCE, REUSE, dan  
RECYCLE (3R)* melalui BANK SAMPAH di KOTA MAKASSAR**

Oleh :

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

0905068003

Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

0915057101

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**MEI 2017**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengembangan Model Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik dalam Implementasi Program Reduce, Reuse dan Recycle (3R) Melalui Bank Sampah di Kota Makassar

**Peneliti/Pelaksana**  
Nama Lengkap : NURYANTI MUSTARI, S.IP  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar  
NIDN : 0905068003  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Nomor HP : 081355584880  
Alamat surel (e-mail) : nuryantimustari@ymail.com

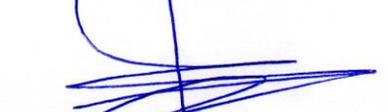
**Anggota (1)**  
Nama Lengkap : Dr IHYANI MALIK S.Sos, M.Si  
NIDN : 0915057101  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

**Institusi Mitra (jika ada)**  
Nama Institusi Mitra : -  
Alamat : -  
Penanggung Jawab : -  
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun  
Biaya Tahun Berjalan : Rp 68,000,000  
Biaya Keseluruhan : Rp 118,000,000

Mengetahui,  
Ketua LP3M Unismuh Makassar

  
(Dr. Ir. ABUBAKAR IDHAM, MP)  
NIP/NIK 195806021992031001

Kota Makassar, 11 - 9 - 2017  
Ketua,

  
(NURYANTI MUSTARI, S.IP)  
NIP/NIK 0905068003

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

---

1. Judul Penelitian : Pengembangan Model Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik dalam Implementasi Program *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R)

2. Tim Peneliti :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)
1	Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si	Lektor	Administrasi Publik	Fakultas Sospol Unismuh Makassar	10 jam/minggu
2	Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si	Lektor	Administrasi Negara	Fakultas Sospol Unismuh Makassar	8jam/minggu

3. Objek Penelitian (Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik)

Pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dalam implementasi program 3 R ( Reduce, Reuse dan Recycle) melalui bank sampah.

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan : April tahun: 2016

Berakhir : bulan : November tahun: 2016

5. Usulan Biaya DRPM/Dirjen Penguatan Risbang

• Tahun ke-1 : Rp.74.475.000

• Tahun ke-2 : Rp.68.000.000

6. Lokasi Penelitian (Lab/studio/lapangan)

Kompleks Kusta Jongaya Jl. Dangko kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)

- Dinas Sosial Kota Makassar, memberikan data tentang penyandang Disabilitas Fisik di Kota Makassar. Selain itu juga dinas social Kota Makassar melakukan kegiatan pemberdayaan dalam bentuk memberikan pelatihan dan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang cacat.

- Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, memberikan data tentang pengelolaan sampah melalui program 3R ( Reduce, Reuse dan Recycle) melalui bank sampah di Kota Makassar.
  - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, memberikan data tentang pemberdayaan wanita disabilitas melalui kegiatan sosialisasi dan pemberian pelatihan.
8. Temuan yang ditargetkan (produk atau masukan untuk kebijakan)
    1. Menerapkan model pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dalam rangka implementasi kebijakan pemerintah yaitu program Reduce, Reuse dan Recycle melalui bank sampah di kompleks Kusta Jl. Dangko Kota Makassar.
    2. Publikasi ilmiah di Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIANA) dengan akreditasi Nasional, atau bahkan ke jurnal Internasional dengan alamat IOSR : *Journal Internasional Avant, Poland*.
  9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraian tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang mendukung pada pengembangan IPTEK  
Sebuah design model pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dalam implementasi program 3R melalui bank sampah di Kota Makassar dengan menggunakan aksesibilitas non fisik dan rehabilitasi pelatihan, selain itu perilaku implementor, perilaku target dan koordinasi antar instansi serta promosi dan pemasaran menjadi variable tambahan untuk menyempurnakan temuan model.
  10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (Tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana publikasi)
    1. Jurnal bereputasi: Journal Internasional Avant, Poland, rencana publikasi tahun 2018
    2. Jurnal Nasional terakreditasi: jurnal ilmu social dan ilmu politik (JSP), rencana publikasi tahun 2018
    3. Jurnal Nasional tidak terakreditasi: JIA (Jurnal Ilmu Administrasi) diterbitkan oleh STIA LAN Bandung, rencana publikasi tahun 2017
  11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya.  
Rencana luaran buku ajar dan HKI (hak Kekayaan Intelektual) akan disusun dan diusulkan pada tahun 2018.



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 LatarBelakang .....	1
1.2 RumusanMasalah .....	4
1.3 Tujuan Khusus Penelitian.....	4
1.4 Urgensi Penelitian dan Luaran Penelitian .....	5
1.5 Target Penelitian.....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. State of The Art .....	6
2.2. Pemberdayaan Masyarakat.....	6
2.2.1 Pengertian Pemberdayaan .....	6
2.2.2 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	7
2.2.3 Penyandang Disabilitas .....	8
2.2.4 Pendekatan dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas .....	10
2.3. Implementasi Program <i>Reduce, Reuse dan Recycle</i> (3R) Melalui Bank Sampah .....	11
2.4. Hasil Studi Pendahuluan dan Kajian yang Telah Dilakukan .....	12
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Lokasi dan Sampel Paragmatik Penelitian .....	15
3.2. Desain Penelitian, Pengumpulan dan Pengelolaan.....	15
3.3. Analisis Data Penelitian .....	16
3.4. Bagan Alir Penelitian .....	18
<b>BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN</b>	
4.1. Anggaran Biaya .....	19
4.2. Jadwal Penelitian .....	19

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Presentase Kaum Disabilitas di Kota Makassar .....	2
Tabel2. Anggaran Biaya yang Diajukan .....	19
Tabel 3. Jadwal Penelitian Tahun I .....	19

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Road Map Penelitian .....	14
Gambar 2. Skema Pertahun Penelitian .....	17
Gambar 3. Bagan Alir Penelitian .....	18

## RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan pokok yakni penyandang disabilitas kurang diberdayakan dalam melaksanakan kebijakan atau program pemerintah, karena adanya gangguan pada fisik mereka yang menghambat aktifitas sosial, ekonomi dan politik sehingga mengurangi haknya untuk beraktifitas penuh seperti masyarakat umumnya. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model pemberdayaan penyandang *disabilitas Fisik* dalam implementasi program *Reuse, Reduce* dan *Recycle (3R)* melalui Bank Sampah di Kota Makassar. Pengembangan Model pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dilakukan melalui (1) pendekatan aksesibilitas non fisik meliputi pemberian pemahaman, dan pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dalam implementasi program 3R, dan (2) pendekatan pelatihan keterampilan kerja mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang berguna dan bernilai ekonomis. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan jenis-jenis penelitian yang relevan. Pengabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, seperti *triangulasi* terhadap data-data implementasi program pemerintah *Reuse, Reduce, Recycle (3R)*. Pendekatan kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara yang mendalam akan digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang valid. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara komperhensif mengenai model pemberdayaan penyandang *disabilitas* fisik dalam implementasi program pemerintah. Penelitian ini direncanakan selama dua tahun dan pada tahun pertama akan difokuskan pada pengembangan model pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dalam implelementadi program 3R.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan, *Disabilitas Fisik*, Implementasi kebijakan.

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemberdayaan menurut Parsons dalam Suharto (2010) adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupan. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan menurut Parsons pada intinya dilakukan sebagai proses memampukan diri seseorang sehingga ia dapat berpartisipasi serta dapat berpengaruh dalam kehidupannya.

Disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dan rentan mengalami hambatan-hambatan yang dapat menghambat mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Maka, diperlukannya perlakuan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus mereka.

Penyandang disabilitas di Indonesia cukup banyak jumlahnya sehingga tidak boleh diabaikan keberadaannya. Berdasarkan catatan Kementerian Kesejahteraan Sosial, jumlah populasi penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 2.126.000 jiwa pada tahun 2012 dengan jenis kecacatan yang berbeda-beda. Sementara itu berdasarkan pendataan hasil kerja sama departemen sosial RI dan surveyor Indonesia pada tahun 2008 bahwa terdapatnya jumlah penyandang disabilitas ( 34.510 orang ) di propinsi sulawesi selatan yang tersebar di 24 kota/kabupaten.

Populasi penyandang disabilitas terdata di kota Makassar sebanyak 2.250 orang yang terdiri atas 1.794 orang penyandang disabilitas fisik, 242 orang penyandang disabilitas mental dan 214 orang penyandang disabilitas fisik dan mental ( ganda ). terdiri atas : 1.390 laki-laki ( 62% ) dan 860 perempuan ( 38% ). Sedangkan berdasarkan sensus BPS tahun 2010 jumlah penyandang disabilitas di

kota makassar jauh lebihbesar yaitu sebanyak 93.629 orang dengan klasifikasi yangberbeda-beda seperti tertera dalam tabel 1.1 dibawah ini:

**Tabel 1:**  
**Persentase Kaum Disabilitas di Kota Makassar**

No	Jenis Disabilitas	Tingkat Ketergantungan		
		Ringan	Sedang	Parah
1	Kesulitan Melihat (Disabilitas Netra)	40.855	2.757	43.612
2	Kesulitan Mendengar (Disabilitas Rungu /Wicara)	11.373	1.778	13.151
3	Kesulitan Berjalan/Naik Tangga (Disabilitas Daksa)	10.901	2.686	13.587
4	Kesulitan Mengingat /Berkonsentrasi /Berkomunikasi ( Disabilitas Grahita )	9.486	2.422	11.908
5	Kesulitan Mengurus Diri Sendiri (Disabilitas Ganda )	8.786	2.585	11.371
<b>TOTAL</b>		<b>81.401</b>	<b>12.228</b>	<b>93.629</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. 2010*

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas PBB pada tanggal 18 Oktober Tahun 2011 lalu dengan diadakannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Dimana Konvensi tersebut memuat mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam segala bidang aspek kehidupan. Sehingga, sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, negara Indonesia wajib untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia dengan memberlakukan kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi kaum disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, baik terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk

teknologi serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik bagi penyandang disabilitas.

Setiap penyandang *disabilitas* mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Termasuk kesempatan berkontribusi dalam mendukung program pemerintah kota yang ada, dalam hal ini program pemerintah kota Makassar yang merupakan derivasi dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No.13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 13 Tahun 2012, dijelaskan bahwa pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah, dan daur ulang sampah (3R) adalah segala aktifitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru. Selanjutnya di ayat 2 dijelaskan bahwa bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Program atau Kegiatan 3R sebenarnya sederhana, dapat dilakukan oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan saja serta tidak membutuhkan biaya yang besar. Hal ini juga menegaskan bahwa penyandang disabilitas punya peluang dan kesempatan yang sama dengan masyarakat pada umumnya, dalam mengimplementasikan kegiatan 3R. Meski sederhana, namun dari 3R yang sederhana ini bisa memberikan dampak yang signifikan bagi penanganan sampah yang sering menjadi permasalahan di sekitar kita. Bahkan dengan upaya yang sungguh-sungguh, penyandang disabilitas dapat berdaya dan mandiri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Sebagai program yang berdasar pada perubahan perilaku manusia, tentu 3R tidak semudah yang dibayangkan. Butuh perencanaan yang matang. Butuh komitmen kuat untuk penegakannya. Dan yang terpenting juga butuh dukungan kolektif dan komprehensif dari semua *stakeholder* tak terkecuali dalam hal ini masyarakat penyandang *disabilitas*.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Koordinasi antar SKPD dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dalam mengimplementasikan program 3R melalui Bank Sampah di Kota Makassar
2. Bagaimana promosi dan pemasaran produk pengelolaan sampah penyandang disabilitas fisik

## **1.3 Tujuan Khusus Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan oleh peneliti sebagai berikut :

- a. Mendeskripsikan koordinasi antar SKPD dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dalam mengimplementasikan program 3R melalui Bank sampah di Kota Makassar.
- b. Mengembangkan promosi dan pemasaran produk pengelolaan sampah penyandang disabilitas fisik dalam mengimplementasikan program 3R melalui Bank Sampah di Kota Makassar

## **1.4 Urgensi Penelitian dan Luaran Penelitian**

- a. Penelitian ini sangat diperlukan untuk pengembangan model pemberdayaan penyandang *disabilitas* dalam implementasi program 3R melalui bank sampah di Kota Makassar, dimana selama ini model pemberdayaan masyarakat penyandang *disabilitas* khususnya disabilitas fisik belum efisien dalam implementasi program pemerintah terkait pengelolaan sampah
- b. Dengan langkah pengembangan model pemberdayaan masyarakat penyandang *disabilitas* diharapkan pemerintah khususnya pemerintah Kota Makassar dapat menemukan strategi awal dalam upaya memberdayakan masyarakat penyandang *disabilitas*, sehingga mereka juga bisa mandiri dalam rangka mengangkat harkat dan martabat masyarakat penyandang disabilitas dalam kehidupan dan penghidupan berbangsa dan bernegara.

- c. Makalah akan di presentasikan dalam seminar Nasional dan akan dibuatkan buku ajar.

### 1.5 Target Penelitian

1. Merancang model yang tepat bagi penyandang disabilitas, khususnya disabilitas fisik dalam rangka implementasi kebijakan pemerintah yaitu kegiatan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah di Kota Makassar.
2. Publikasi ilmiah di Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIANA) dengan akreditasi Nasional, atau bahkan ke Jurnal Internasional dengan alamat IOSR : *Journal Of Humanities and Social Science*

**.Tabel 2 Rencana Target Capaian Tahunan**

No	Jenis Luaran				Indikator Capaian	
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	TS	TS+1
1	Artikel ilmiah di muat di jurnal	Internasional bereputasi			Submitted	
		Nasional Terakreditsi			Tidak ada	
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding	Internasional Terindeksi			Tidak ada	
		Nasional			Sudah dilaksanakan	
3	<i>Invited Speaker</i> dalam temu ilmiah	Internasional			Tidak ada	
		Nasional			Tidak ada	
4	<i>Visiting Lecturer</i>	Internasional			Tidak ada	
5	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Paten			Tidak ada	
		Paten sederhana			Tidak ada	
		Hak Cipta			Tidak ada	
		Merek dagang			Tidak ada	
		Rahasia dagang			Tidak ada	
		Desain Produk Industri			Tidak ada	

		Indikasi Geografis			Tidak ada	
		Perlindungan Varietas Tanaman			Tidak ada	
		Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu			Tidak ada	
6	Teknologi Tepat Guna				Tidak ada	
7	Model/Purwapura/Desain/karya Seni/Rekayasa Sosial				Tidak ada	
8	Buku Ajar (ISBN)				Tidak ada	
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)					

## **BAB 2. TINJAUN PUSTAKA**

### ***2.1 State of The Art***

Permasalahan penyandang disabilitas (cacat) timbul karena adanya gangguan pada fisik maupun mental mereka yang menghambat aktifitas sosial, ekonomi, maupun politik sehingga mengurangi haknya untuk beraktifitas penuh dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Untuk memecahkan pokokpermasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan. Di dalam penelitian ini akan dikembangkan model pemberdayaan penyandang disabilitas fisik diantaranya : tuna netra, tuna wicara, tuna rungu, tuna daksa dan tuna laras dengan 2 pendekatan yaitu (1) pendekatan aksesibilitas dengan memberikan pemahaman dan kesempatan untuk menjadi pelaku/subjek dalam implementasi 3R melalui Bank sampah, (2) pendekatan rehabilitasi pelatihan keterampilan kerja dengan mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang berguna. Dengan dua pendekatan tersebut akan tercipta suatu model yang cocok sebagai strategi yang dapat diterapkan pemerintah dalam memberdayakan penyandang disabilitas dalam implementasi program 3R, sehingga nantinya akan dicapai kondisi mental

sosial, serta dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyandang disabilitas sebagai modal dasar meningkatkan kesejahteraannya.

## **2.2 Pemberdayaan Masyarakat**

### **2.2.1 Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga di akhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan. Berkaitan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) menyatakan bahwa: *Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to 'work the system,' and so on (Ife, 1995).*

Definisi tersebut di atas mengartikan konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Di sisi lain Paul (1987) dalam Prijono dan Pranarka (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap "proses dan hasil pembangunan." Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

### **2.2.2 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan. Dalam perspektif pembangunan ini, disadari betapa penting kapasitas

manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan nonmaterial. Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantuk lien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya (Payne, 1997).

Sementara itu Ife (1995) memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka.

Sementara itu, Sutrisno (2000) menjelaskan, dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah. Meskipun rumusan konsep pemberdayaan berbeda-beda antara ahli yang satu dengan yang lainnya, tetapi pada intinya dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebagai upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau melakukan pembaruan pada suatu komunitas atau masyarakat dari kondisi ketidak berdayaan menjadi berdaya dengan menitik beratkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat.

Dengan demikian mereka diharapkan mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menentukan masa depan mereka, dimana provider dari pemerintah dan lembaga non government organization hanya mengambil posisi partisipan, stimulan, dan motivator.

### 2.2.3 Penyandang *Disabilitas*

Menurut *General Election Network For Disability Acces* (2013) Berdasarkan laporan ESCAP (*The Economic and Sosial Commission for Asia and the Pasific*), bahwa setiap negara memiliki definisinya sendiri tentang disabilitas. Bahkan, di beberapa negara seperti Indonesia, setiap badan pemerintahan memiliki istilah dan definisinya sendiri. Keragaman definisi membuat organisasi internasional seperti *Disabled People's International* (DPI) memutuskan untuk tidak mengadopsi atau membuat definisi untuk menghindari kemungkinan terjadi perselisihan dengan pihak lain. Namun, kini terjadi perkembangan transisi dalam memandang disabilitas dari model medis ke model sosial. Model medis memandang disabilitas sebagai masalah kesehatan, sementara model sosial memandang disabilitas sebagai hasil dari interaksi sosial. Kedua model ini tidak dapat didefinisikan secara terpisah karena disabilitas juga berakar dari dan mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang dan kedua model ini saling melengkapi.

Definisi disabilitas berdasarkan *Disability Discrimination Act* (DDA) bahwa “Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki gangguan fisik atau mental yang memiliki efek samping yang besar dan jangka panjang pada kemampuannya untuk melaksanakan aktivitas normal *sehari-hari*”.

Terdapat kriteria penyandang *disabilitas* dalam *Disability Discrimination Act* (DDA) yaitu:

- a. Mereka yang memiliki gangguan mental atau fisik.
- b. Gangguan tersebut memiliki efek yang buruk pada kemampuan mereka untuk melaksanakan kegiatan normal mereka sehari-hari.
- c. Gangguan tersebut memiliki efek samping yang substansial dan jangka panjang (telah berlangsung selama 12 bulan atau lebih atau selama sisa hidup seseorang).

*World Health Organization* (WHO) memiliki definisi sendiri mengenai disabilitas. Menurut WHO, disabilitas diartikan sebagai: istilah

umum yang memiliki gangguan fungsi tubuh atau struktur, keterbatasan aktifitas dan pembatasan partisipasi. Dalam hal ini meliputi gangguan dalam fungsi tubuh atau struktur, pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan. Sedangkan pembatasan partisipasi adalah masalah yang dialami oleh seseorang individu dalam keterlibatannya *dalam* kehidupan sehari-hari. Jadi disabilitas adalah fenomena yang kompleks yang mencerminkan interaksi antara bagian tubuh seseorang dan bagian dari masyarakat dimana dia tinggal.

Di Indonesia, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kaum disabilitas. Salah satunya adalah undang-undang mengenai Penyandang Cacat yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Pada pasal 1 disebutkan bahwa:

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- a. Penyandang cacat fisik yaitu kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara;
- b. Penyandang cacat mental yaitu kelainan mental dan/atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit;
- c. Penyandang cacat fisik dan mental yaitu seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.

#### **2.2.4 Pendekatan dalam Memberdayakan Penyandang *Disabilitas***

##### a) Model Aksesibilitas

Model Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan (UU No.4 Tahun 1997 pasal 1 ayat4).

##### b) Model Rehabilitasi

Model Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penyandang cacat

agar dapat melaksanakan fungsi sosial dan berinteraksi aktif di tengah keluarga/masyarakat dan lingkungannya (UU No.4 Tahun 1997 pasal 17).

Rehabilitas penyandang *disabilitas* meliputi:

- Rehabilitasi Sosial, yakni untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang *disabilitas* agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal.
- Rehabilitasi Pendidikan, yakni agar penyandang *disabilitas* dapat pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
- Rehabilitasi Pelatihan Keterampilan Kerja, yakni agar penyandang *disabilitas* memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

### **2.3 Implementasi Program *Reduce, Reuse dan Recycle*(3R) Melalui Bank Sampah.**

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 13 Tahun 2012, dijelaskan bahwa pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah, dan daur ulang sampah (3R) adalah segala aktifitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru. Selanjutnya di ayat 2 dijelaskan bahwa bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk merubah paradigma masyarakat tentang sampah. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* melalui bank sampah. Suatu upaya sistematis dalam membudayakan perilaku yang baru dalam mengelola sampah yang mereka hasilkan agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran dan masif karena setiap warga masyarakat melakukannya. Sampah dipilah menjadi sampah organik dan

anorganik. Sampah organik berpotensi untuk diolah menjadi kompos sedangkan sampah anorganik disetorkan ke bank sampah. Tujuan dibangunnya bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian peranserta masyarakat agar dapat “bersahabat” dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus bersinergi dengan gerakan 3R (*reuse, reduce, recycle*), sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. Pelaksanaan bank sampah diharapkan akan memberikan sebuah nilai tambah serta nilai ekonomis terhadap sampah. Keberadaan bank sampah juga akan menjadikan realisasi konsep ekonomi kerakayatan yang dapat dan mudah untuk diimplementasikan oleh siapapun termasuk penyandang disabilitas. Bank sampah juga mampu memberikan manfaat utamanya keuntungan masyarakat dari sampah tersebut. Dalam Implementasi Program 3R merujuk pada model implementasi kebijakan publik menurut Menurut Winter dalam Nugroho(2007), Mengidentifikasi empat variabel kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu (1) Proses pormasi kebijakan, (2) Perilaku Organisasi implementasi, (3) Perilaku birokrat pelaksana ditingkat bawah (*street-level bureaucrats*), (4) Respon kelompok target kebijakan dan perubahan dalam masyarakat. Sehingga pada penelitian ini digunakan model Winter untuk menjawab permasalahan pokok yang pertama, tentang deskripsi perilaku penyandang disabilitas fisik dan peran pemerintah (birokrat) dalam mengimplementasikan program 3R, kemudian dari deskripsi masalah terkait perilaku penyandang disabilitas, maka selanjutnya akan dilakukan pengembangan model pemberdayaan penyandang disabilitas dengan pendekatan aksesibilitas non fisik dan rehabilitasi pelatihan keterampilan kerja dalam implementasi program 3R melalui Bank sampah di Kota Makassar.

#### 2.4 Hasil Studi Pendahuluan dan Kajian yang Telah Dilakukan

Hasil penelitian Megayani Putri (2014) yang berjudul Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dalam Pelayanan Kesehatan Prima bagi Penderita Intellectual Disability di kampung Idiot (Studi di Kecamatan Jomban) adalah adanya kebijakan pemerintah meningkatkan akses keterjangkauan obat dan pelayanan kesehatan. Pemerintah dalam hal ini melakukan inovasi mengadakan posyandu bagi penderita *Intellectual Disability*. Implementasi pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan kepada masyarakat penyandang *intellectual disability* masih dikategorika belum prima.

Beberapa penelitian terdahulu hanya mengkaji tentang pemberian layanan pemerintah kepada penyandang disabilitas, misalnya layanan kesehatan. Penyandang disabilitas belum menunjukkan peran dan partisipasinya secara riil dalam pelaksanaan kebijakan atau program pemerintah. Penyandang disabilitas hanya menjadi objek pembangunan, belum tampil sebagai aktor /subjek dalam implementasi program 3R melalui bank sampah di Kota Makassar. Dengan melibatkan mereka, melalui pendekatan aksesibilitas dan rehabilitasi pelatihan, mereka akhirnya akan mandiri dan mampu meningkatkan harkat dan martabatnya dalam kehidupan bermasyarakat.

## **2.5 Konsep Koordinasi**

Koordinasi pengertian umum, koordinasi adalah sebuah proses saling mengerti antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu hal. Proses yang harus dijalani agar sesuatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan dengan lancar ataupun jika ada masalah tidak akan terlalu banyak kesulitan untuk mengatasinya, koordinasi merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi / pejabat yang mempunyai fungsi dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai untuk menghindari adanya kesimpang siuran pelaksanaan pekerjaan

Meokijat dalam Hubert (2009 ) mengemukakan bahwa koordinasi adalah penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan - kegiatan yang slaing bergantung dari individu - individu untuk mencapai tujuan bersama.tanpa adanya koordinasi. Individu - individu dan bagian - bagian tidak dapat melihat peran

mereka dalam organisasi. Hasibuan ( 2011) berpendapat “ koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, dan pekerjaan –pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut G.R. Terry dalam Hasibuan ( 2012) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut E.F.L. Brech, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing - masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri Hasibuan (2007). Koordinasi salah satu bentuk hubungan kerja yang memiliki karakteristik khusus. Karakteristiknya antara lain harus adanya integrasi serta sinkronisasi atau adanya keterpaduan, keharmonisan, serta arah yang sama. Pentingnya koordinasi ini agar organisasi dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi. Hal ini berarti bahwa tujuan organisasi dapat tercapai serta dalam pencapaiannya dimanfaatkan semua sumber daya secara hemat dan ekonomis.

Menurut Djamin dalam ( Hasibuan 2011) koordinasi adalah suatu usaha kerja sama badan instansi, unit, dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga dapat saling, mengisi membantu, dan saling melengkapi. Menurut Suprianto (2009) koordinisasi artinya mempunyai kemampuan untuk melakukan tugas dengan efektif dan efisien, yang dimaksud efisien adalah melakukan sebuah koordinasi orang- orang didalmannya harus mampu menyelesaikan tugas dengan benar dan memiliki kemampuan dibandingnya masing - masing. Koordinasi adalah proses pengintergrasian tujuan - tujuan dan kegiatan pada satuan - satuan yang terpisah (departemen atau bidang - bidang fungsional ) suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien, Menurut Handoko ( 2003) kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam - macam satuan pelaksanaannya. Hal ini juga ditegaskan oleh Handayaniingrat ( 1985) bahwa koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan, selain itu Handayaniingrat juga

mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena saling mempengaruhi sama lain.

## 2.6 Konsep Pemasaran dan Promosi

### 2.6.1 Pemasaran

Pemasaran mengandung arti yang luas karena membahas mengenai masalah yang terdapat dalam perusahaan dan hubungannya dengan perdagangan barang dan jasa. Menurut Kotler (2008:6) pemasaran adalah suatu proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Menurut Gunawan Adisaputro (2010:4) pemasaran adalah fungsi organizational dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan dengan cara-cara yang menguntungkan bagi organisasi dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*)

Dalam proses pemasaran perusahaan harus bekerja untuk memahami pelanggan, menciptakan nilai bagi pelanggan, dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Dengan menciptakan nilai bagi pelanggan, sebagai imbalannya mereka menangkap nilai dari pelanggannya dalam bentuk penjualan, laba, dan ekuitas pelanggan dalam jangka panjang. Lebih lanjut mengenai pengertian manajemen pemasaran didefinisikan oleh Kotler (2008:10) seni dan ilmu pengetahuan tentang cara memilih pasar sasaran dan mendapatkan, memelihara hubungan, meningkatkan jumlah pelanggan melalui proses kreasi, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang superior.

Menurut Kotler (2008:58) strategi pemasaran adalah logika pemasaran dimana perusahaan berharap untuk menciptakan nilai pelanggan dan mencapai hubungan yang menguntungkan. Perusahaan memutuskan pelanggan mana yang akan dilayaninya dan bagaimana cara perusahaan melayaninya. Pemasaran pada dasarnya mencakup segala kegiatan tersebut, namun demikian pemasaran

ternyata lebih dari sekedar kegiatan-kegiatan tersebut. Berbagai kegiatan seperti pembujukan, promosi, publikasi, semuanya adalah kegiatan pemasaran.

Konsep-konsep inti pemasaran meliputi : kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai dan kepuasan, pertukaran, transaksi dan hubungan pasar, pemasaran dan pasar. Kita dapat membedakan antara kebutuhan, keinginan dan permintaan. Kebutuhan adalah suatu keadaan dirasakannya ketiadaan kepuasan dasar tertentu. Keinginan adalah kehendak yang kuat akan pemuas yang spesifik terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendalam. Permintaan adalah keinginan akan produk yang spesifik yang didukung dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya.

Sistem pemasaran yang paling sederhana terdiri dari dua unsur yang saling berkaitan, yaitu organisasi pemasaran dan target pasarnya. Unsur-unsur dalam sebuah sistem radio stereo. Bekerja secara terpisah, tetapi pada waktu dipertemukan secara tepat. Strategi pemasaran menurut Kotler (2008:58) adalah logika pemasaran di mana perusahaan berharap untuk menciptakan nilai pelanggan dan mencapai hubungan yang menguntungkan. Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu dibidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu pemasran.

#### 2.6.2 Promosi

Dalam memasarkan produk perlu merangsang dan menyebarkan informasi tentang kehadiran, ketersediaan, cirri-ciri, kondisi produk, dan manfaat atau kegunaan dari produk yang dihasilkan. Kegiatan ini disebut promosi. Promosi merupakan teknik komunikasi yang secara penggunaannya atau penyanpaiannya dengan menggunakan media yang tujuannya untuk menarik minat konsumen terhadap hasil produksi suatu industri.

Menurut Michael rey (1982:17) promosi sebagai *“the coordination of all seller-intated efforts to setup channels of information and persuasion to sell goods services or promote an idea”* (koordinasi dari seluruh upaya yang dimulai dari pihak penjual untuk membangun berbagai saluran informasi dan

persuasi untuk menjual barang dan jasa atau memperkenalkan suatu gagasan). Menurut Basu Swasta (2002:28) mengatakan bahwa *promotional mix* merupakan kombinasi dari alat-alat promosi, yaitu periklanan, penjualan tatap muka, promosi penjualan dan publisitas yang dirancang untuk menjual barang dan jasa. Walaupun komunikasi antar perusahaan dan konsumen secara implicit berlangsung pada setiap unsur atau bagian dari *marketing mix*.

Tujuan dari pada promosi adalah memperkenalkan barang hasil produksi, dengan tujuan agar konsumen membeli hasil produksinya, dengan demikian volume penjualan dapat meningkat dan juga dapat meningkatkan laba. Hal ini dapat dicapai suatu industri bila promosi yang dijalankan benar-benar tepat sehingga pelaksanaan promosi dapat berhasil seefektif mungkin. Promosi merupakan salah satu bauran pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mengadakan komunikasi dengan pasarnya. Promosi juga sering dikatakan sebagai proses berlanjut, Karena dapat menimbulkan rangkaian kegiatan selanjutnya bagi perusahaan.

Tujuan utama dari promosi yang dilakukan secara mendasar terdiri dari beberapa alternative, antara lain : menginformasikan, mempengaruhi, membujuk dan mengingatkan sasaran konsumen tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Tujuan promosi tersebut menurut Sugiyono yang di kutip oleh Magfira (2010:133)

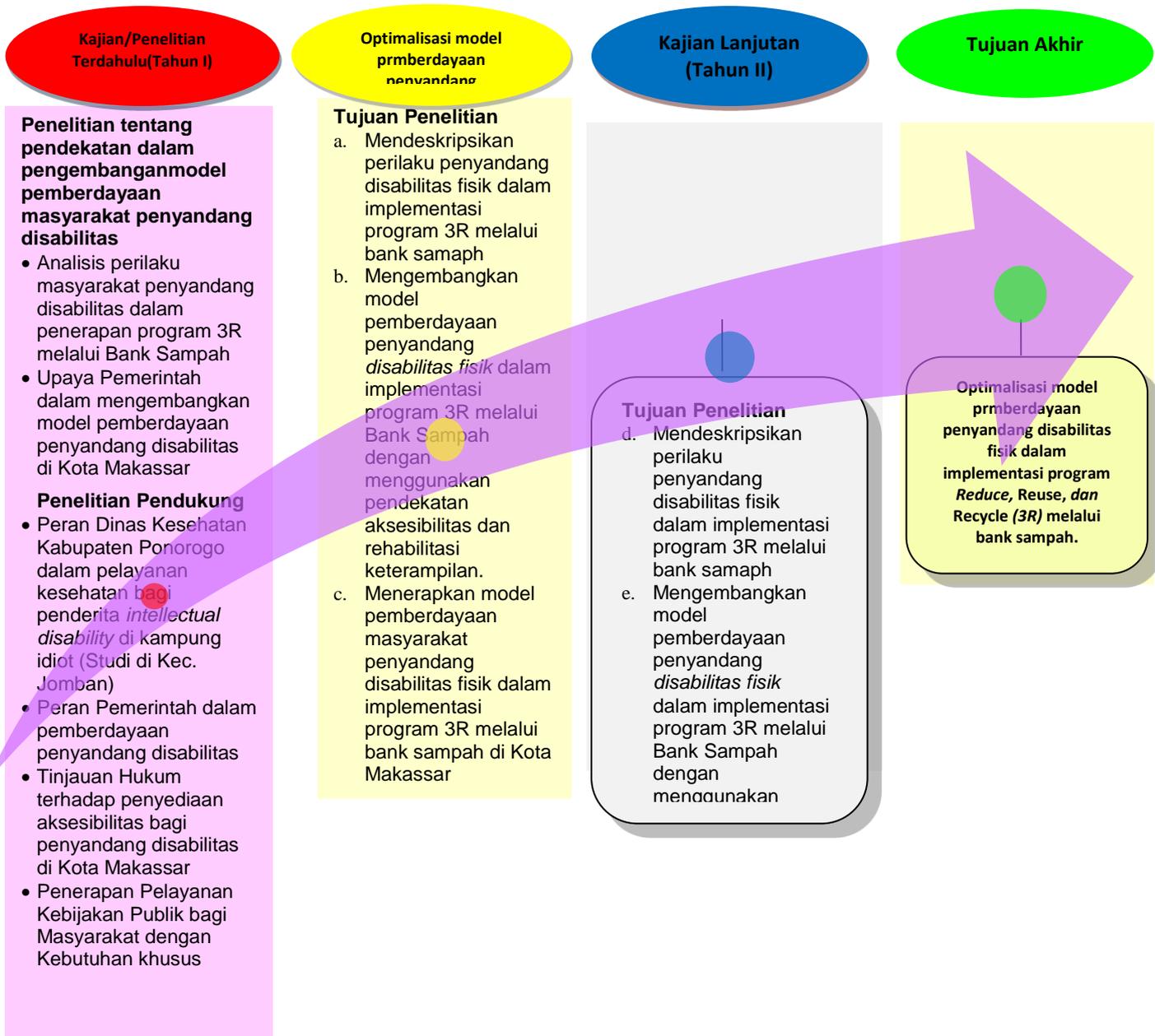
### **3.6 Interpretasi Kerangka Konsep**

Interpretasi yang dapat dikemukakan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dalam implementasi program 3R, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja masyarakat penyandang disabilitas agar mampu hidup mandiri di tengah masyarakat, dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Penyandang Disabilitas Fisik adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya.
2. Pendekatan aksesibilitas fisik adalah adanya pemberian pemahaman dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam implementasi program *Reduce, Reuse*

dan *Recycle* melalui bank sampah. Pendekatan ini perlu dilakukan untuk memberi pemahaman awal kepada penyandang disabilitas sehingga terjadi perubahan perilaku dalam mengimplementasikan program 3R. Selain itu penyandang disabilitas fisik diberi kesempatan yang sama dengan masyarakat umumnya untuk terlibat dalam kegiatan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* melalui bank sampah di Kota Makassar

3. Pendekatan Rehabilitasi Pelatihan Kerja adalah pemberian pelatihan (*training*) upaya pembatasan sampah (*Reduce*), *training* guna ulang sampah (*Reuse*), dan *training* daur ulang sampah (*Recycle*).
4. Pengembangan model pemberdayaan penyandang disabilitas fisik menekankan pada pendekatan aksesibilitas dan rehabilitasi pelatihan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan sosial masyarakat penyandang disabilitas.



**Gambar 1.** Road Map Penelitian

## **BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan oleh peneliti sebagai berikut :

- a. Mendeskripsikan koordinasi antar SKPD dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dalam mengimplementasikan program 3R melalui Bank sampah di Kota Makassar.
- b. Mengembangkan promosi dan pemasaran produk pengelolaan sampah penyandang disabilitas fisik dalam mengimplementasikan program 3R melalui Bank Sampah di Kota Makassar

### **3.2 Manfaat Penelitian**

- a. Penelitian ini diperlukan untuk mendeskripsikan koordinasi antar SKPD atau hubungan antar instansi dalam upaya memberdayakan penyandang disabilitas fisik, untuk mensukseskan implementasi kebijakan Makassar Tidak Rantasa (MTR) dengan mengintensifkan pemahaman tentang 3R bagi penyandang disabilitas fisik
- b. Dengan langkah koordinasi antar SKPD dalam pengembangan model pemberdayaan masyarakat penyandang *disabilitas* diharapkan pemerintah khususnya pemerintah Kota Makassar dapat menjalin koordinasi atau hubungan kemitraan dalam upaya memberdayakan masyarakat penyandang *disabilitas*, sehingga mereka juga bisa mandiri dalam rangka mengangkat harkat dan martabat masyarakat penyandang disabilitas dalam kehidupan dan penghidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Makalah akan di presentasikan dalam seminar Nasional dan akan dibuatkan buku ajar.

## **BAB 4. METODE PENELITIAN**

### **4.1 Lokasi dan Sampel Pragmatik Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada beberapa institusi yang terkait secara langsung dengan aktivitas pemberdayaan penyandang *disabilitas* fisik dalam implementasi program *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R) melalui bank sampah di kota Makassar. Lokasi penelitian ini terpusat di Makassar karena instansi dan lembaga atau objek penelitian juga berada di wilayah Makassar.

## 4.2 Desain Penelitian, Pengumpulan dan Pengelolaan

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis-jenis penelitian yang relevan seperti *triangulasi* untuk memperoleh sumber-sumber informasi mengenai implementasi program *Reduce, Reuse, dan Recycle (3R)* melalui bank sampah. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana model pemberdayaan penyandang *disabilitas* fisik dalam implementasi program pemerintah *3R* di kota Makassar.

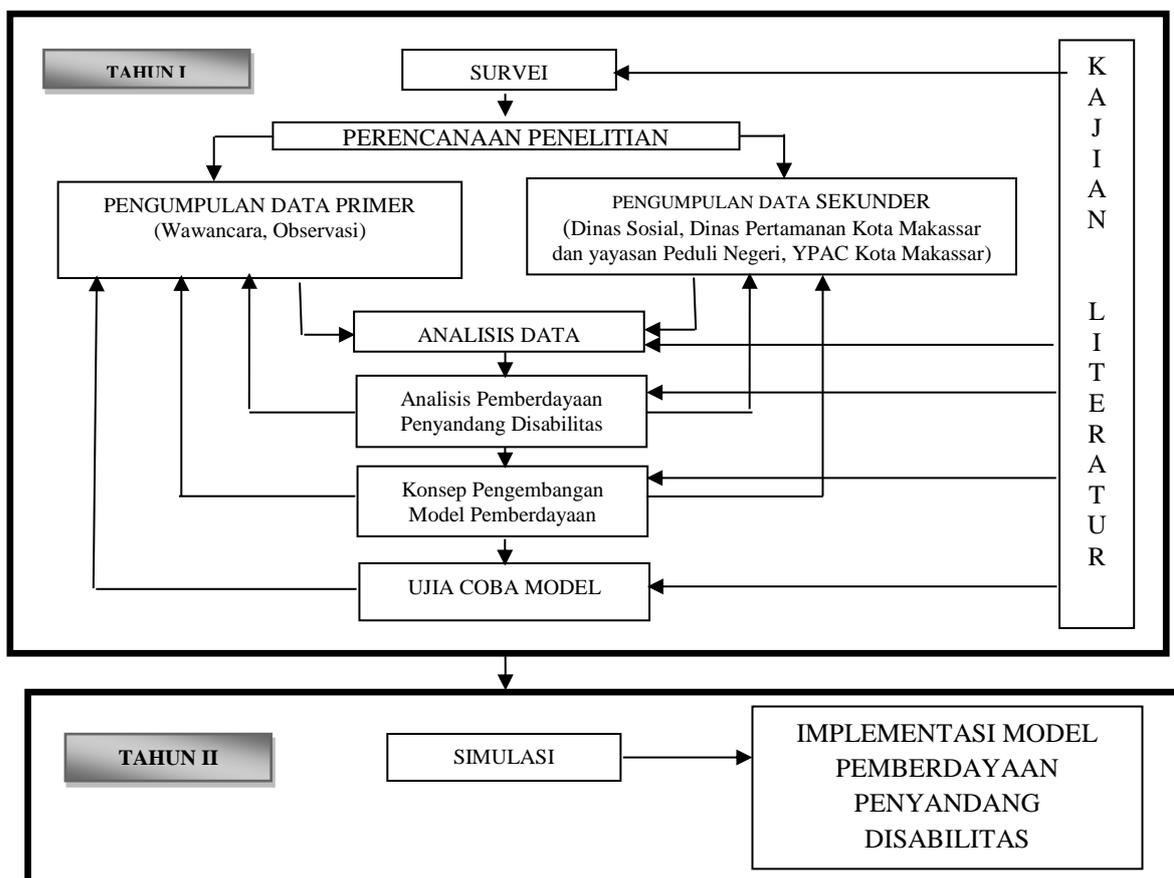
Data-data yang akan diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer akan dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam (*depth interview*) terhadap obyek sasaran yakni penyandang *disabilitas* fisik. Wawancara dan observasi yang mendalam dilakukan untuk mendapatkan data apa adanya atau sebagaimana yang terjadi tanpa memanipulasi dan menggeneralisasi (Sugiono, 2008). Sedangkan data sekunder akan didapatkan dengan penelusuran dokumentasi sumber-sumber penyandang *disabilitas* dengan menggunakan pendekatan positivistik, dalam implementasi program *Reduce, Reuse, dan Recycle (3R)* melalui bank sampah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat penyandang *disabilitas* fisik di Kota Makassar.

Pengelolaan data kualitatif dalam penelitian ini akan dilakukan dengan memberikan kategori, mensistematisir dan memproduksi makna atas apa yang menjadi variabel penelitian. Ada tiga langkah pengolahan data kualitatif dalam penelitian ini yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Reduksi data dalam tahap ini, peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh. Penyajian data yaitu peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengembalian tindakan dan display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif. Penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proposisi.

### 3.1. Analisis Data Penelitian

Analisis data primer dilakukan atas statemen (*statement*) atau persyaratan yang dikemukakan oleh para informan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca seluruh transkrip wawancara yang ada dan mendeskripsikan seluruh pengalaman yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan upaya pada tahap yang dikemukakan tersebut akan diketahui makna dari statemen yang ada, baik makna yang bersifat implisit maupun makna eksplisit dari pernyataan atas objek yang diteliti. Uraian makna yang dikemukakan akan menunjukkan kecenderungan arah jawaban atau pengertian yang dimaksudkan oleh para informan. Sedangkan analisis data sekunder dilakukan dengan cara mendeskripsikan seluruh data-data potensi daerah khususnya data yang telah tersedia atau terdokumentasi pada masing-masing daerah, kemudian di analisis keterkaitannya dengan data primer yang diperoleh dari para informan.

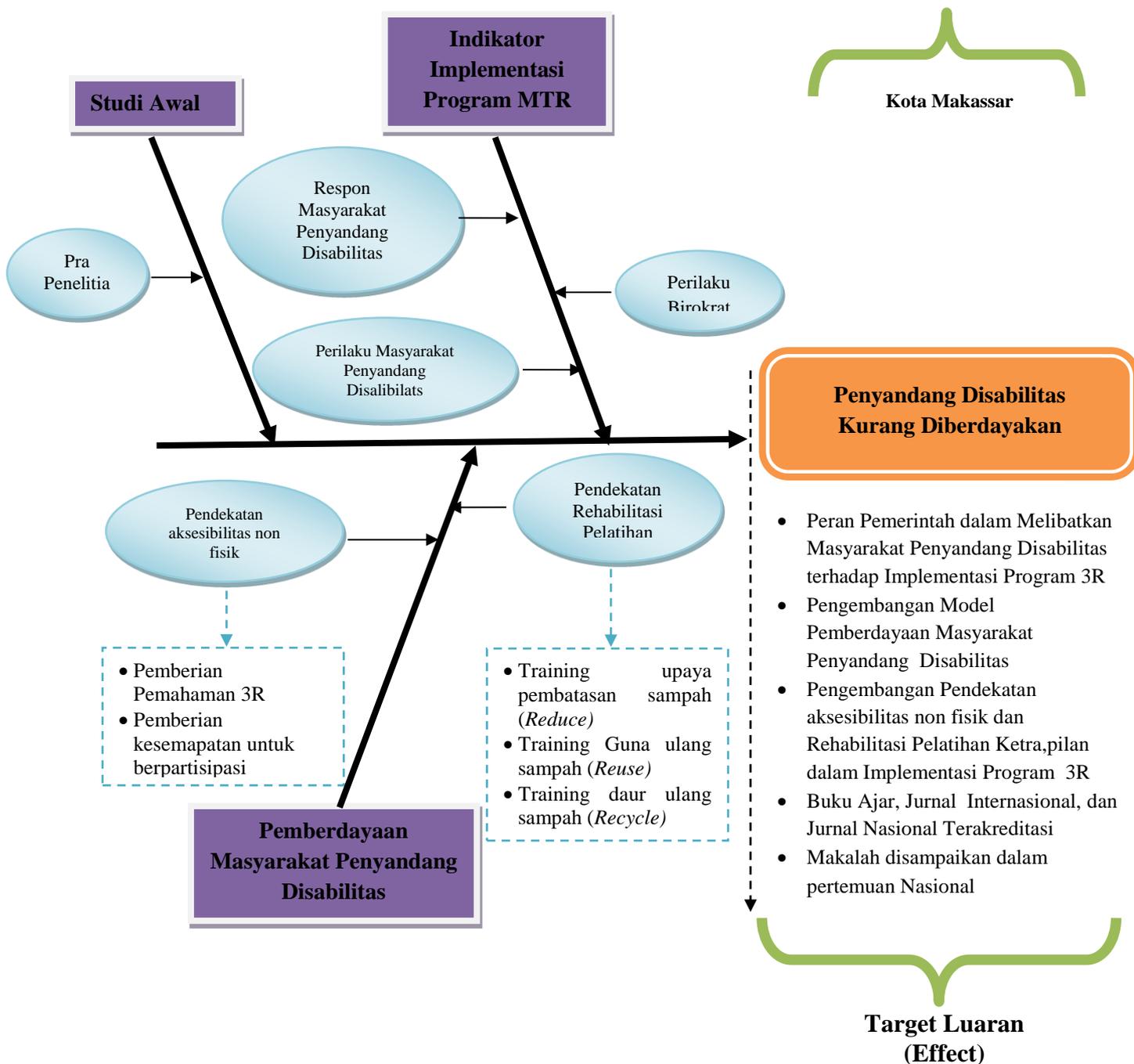
Selengkapnya arah kepada tujuan umum jangka panjang penelitian yang dilakukan dalam penelitian Hibah Bersaing akan digambarkan dalam skema berikut :



Gambar 2 :Skema Pertahun Penelitian

### 3.4 Bagan Alir Penelitian

Bagan alir penelitian ini menggambarkan apa yang akan dilaksanakan untuk 2 tahun dalam bentuk *fishbone diagram* sebagaimana terlihat di bawah ini:



Gambar 3. Bagan Alir Penelitian.

## **BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

### **5.1 koordinasi antar SKPD dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dalam mengimplementasikan program 3R melalui Bank sampah di Kota Makassar.**

Berdasarkan Hasil Penelitian, koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas fisik melalui bank sampah sangatlah penting. Bukan untuk individu maupun sekelompok orang saja, tetapi seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas fisik turut berkontribusi dalam bank sampah. Hal ini dikarenakan untuk menumbuhkan kesadaran mengurangi jumlah sampah yang di buang ke TPA yang mencapai 1200 ton . Dengan melakukan pemilahan sampah melalui bank sampah turut menjaga dan melestarikan lingkungan yang bebas dari sampah. Jika seluruh instansi dan SKPD berkoordinasi maka besar pengaruhnya terhadap pengurangan jumlah produksi sampah di Kota Makassar. UPTD daur ulang sampah berkoordinasi dengan hampir seluruh SKPD di Kota Makassar, salah satunya dengan kecamatan Tamalate yang mana memiliki bank sampah dangko mandiri yang di dalamnya melibatkan penyandang disabilitas fisik.

UPTD daur ulang sampah mewakili Dinas Lingkungan hidup dalam memberdayakan masyarakat melalui bank sampah termasuk memberdayakan penyandang disabilitas fisik di bank sampah dangko mandiri. Bentuk koordinasi bank sampah pusat dan bank sampah unit berupa tanggung jawab bahwa bank sampah pusat memiliki kewajiban untuk melayani dan memfasilitasi bank sampah unit. Dalam berkoordinasi diperlukan tanggung jawab. UPTD daur ulang sampah memfasilitasi berupa penyediaan timbangan, karung dan buku rekening. Yang kemudian fasilitas-fasilitas inilah yang nantinya digunakan bank sampah unit salah satunya bank sampah dangko mandiri dalam kegiatan-kegiatan pemilahan sampah dan megoptimalkan kinerja bank sampah unit, memfasilitasi pembelian produk dengan penjemputan. Selain itu bank sampah pusat juga melakukan sosialisasi bank sampah, jika bank sampah unit membutuhkan sosialisasi. Perlu diketahui terkait sosialisasi, jika bank sampah unit telah memiliki MOU dan SK bank sampah maka UPTD daur ulang sampah (bank sampah pusat) tinggal menunggu undangan dari bank sampah unit untuk melakukan sosialisasi.

Pengawasan UPTD daur ulang sampah dalam berkoordinasi dengan bank sampah unit di kecamatan tidak dilakukan melainkan lebih pada pendekatan memotivasi bank sampah unit termasuk bank sampah dangko mandiri. Memotivasi dengan mendorong

warga untuk lebih berpartisipasi dalam memperhatikan sampah di kota Makassar dengan turut terlibat dalam bank sampah. Dalam memberikan motivasi UPTD daur ulang sampah memberikan penjelasan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan jenis-jenis item sampah yang bernilai ekonomi karena tidak semua barang buangan bisa dikelola. Misalnya computer dia bukan kategori plastik tetapi damal. Begitu pula jenis sampah basah, sampah jenis ini akan disediakan kompostor aerop yang bisa diolah menjadi kompos. UPTD daur ulang sampah sebagai bank sampah pusat dalam berkoordinasi dengan bank sampah unit, UPTD daur ulang sampah tidak memiliki wewenang dan hak untuk menginterferensi bank sampah unit karena bank sampah unit berdiri atas kemauan sendiri.

Bentuk pengawasan yang dilakukan dalam berkoordinasi bahwa dinas lingkungan hidup yang bertugas mengawasi dengan melakukan verifikasi pada saat SK bank sampah dari kelurahan telah dikeluarkan maka dinas lingkungan yang memverifikasi SK tersebut. Untuk menjalin hubungan koordinasi yang baik, maka sesuai dengan tujuannya masing-masing bahwa bank sampah pusat membeli barang dari bank sampah unit karena bank sampah unit tidak dapat langsung membeli barang dari nasabah. Sudah jelas bahwa prosedur pembelian produk, nasabah terlebih dahulu mengumpulkan sampahnya di bank sampah unit lalu di bank sampah unit akan dipilah-pilah. Sampah yang telah dipilah-pilah akan menjadi produk yang selanjutnya akan di jemput dan dibeli oleh bank sampah pusat.

Bentuk komunikasi yang dijalin dalam berkoordinasi antar Banksampah pusat dan bank sampah unit dilakukan melalui sms, telpon dan WA. Misalnya dalam hal perubahan harga barang dari vendor dari harga 7000 menjadi 7500. Adapun perubahan harga tidak bisa ditentukan kapan waktunya karena perubahan harga bergantung pada vendor. Jika terjadi perubahan harga dari vendor maka satu minggu sebelumnya vendor akan mengkomunikasikan ke Bank Sampah Pusat tentang perubahan harga selanjutnya bank sampah pusat akan mengkomunikasikan kepada bank sampah unit melalui sms, telpon dan WA tentang perubahan harga. Terjadinya perubahan harga barang yang tidak menentu dikarenakan belum adanya penetapan harga dari pemerintah. Kesadaran akan pentingnya berkoordinasi sangat diperlukan karena untuk bekerjasama setiap instansi harus saling memahami tujuannya masing-masing. Dalam melakukan pelayanan dari pihak BSP dan BSU sebelumnya telah ada MOU yakni surat kesepakatan bahwa BSP siap melayani BSU. Dalam pembuatan MOU ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Ketua BSU.

Bank sampah pusat dalam berkoordinasi dengan bank sampah unit, sesuai dengan tupoksinya melakukan sosialisasi kepada bank sampah unit tentang produk sampah, pemilahan sampah. Seperti halnya bank sampah unit di dangko mandiri jika ada undangan untuk melakukan sosialisasi maka bank sampah pusat bersedia untuk melakukannya. Tetapi jika tidak ada undangan untuk sosialisasi maka bank sampah pusat tidak akan melakukan sosialisasi.

Kendala-kendala yang dialami bank sampah pusat yakni masalah vendor saat pertama kali dibentuk bank sampah, selain masalah vendor masalah lain yang dihadapi oleh bank sampah pusat yakni terbatasnya angkutan untuk penjemputan sampah, terutama angkutan penjemputan untuk di lorong-lorong. Namun seiring berjalannya waktu kendala-kendala tersebut mulai teratasi masalah vendor kini telah banyak vendor yang bagus dan cara membelinya pun cukup tinggi. Masalah angkutan penjemputan sampah kini armada pengangkutan sudah bertambah dan lagi kini sudah ada armada motor tiga roda yang bisa masuk ke lorong-lorong. Dalam memberdayakan penyandang disabilitas fisik dinas sosial bekerjasama dengan RT dan RW, dalam mengikutkan warganya khususnya penyandang disabilitas eks kusta dalam kegiatan keterampilan dan pembinaan.

Koordinasi sangat penting dilakukan terutama dalam pelaksanaan suatu kegiatan maka kita harus berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Bahwa untuk melakukan suatu kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas fisik, Dinas social kota Makassar harus bersikap sipakatau, karena untuk melakukan kegiatan harus sepengetahuan pemilik daerah/wilayah di Kecamatan Tamalate. Koordinasi Dinas Sosial di kecamatan tamalate hanya bentuk laporan bahwa warganya di kompleks kusta akan diberikan keterampilan dan pembinaa. Tanggung jawab Dinas Sosial Kota Makassar dalam berkoordinasi sesuai dengan tupoksinya bahwa dinas social bertanggung jawab untuk memberdayakan penyandang disabilitas fisik. Meskipun pemberdayaan penyandang disabilitas fisik belum tertangani secara keseluruhan.

Kejelasan tugas dinas sosial kota Makassar dalam berkoordinasi memberdayakan penyandang disabilitas fisik yaitu dengan memberikan keterampilan bagi penyandang disabilitas fisik yang masih produktif, dan pemberdayaan bagi keluarga penyandang disabilitas yang mempunyai anggota keluarga cacat berat. Dalam memberdayakan penyandang disabilitas fisik Dinas Sosial Kota Makassar memberikan pendampingan terhadap penyandang disabilitas fisik yang telah diberikan pemberdayaan. Pendampingan

yang diberikan berupa pemantauan oleh pendamping. Pendamping tersebut sebanyak dua orang dari dinas social Kota Makassar. Pendampingan ini diberikan dalam kegiatan pembinaan eks kusta yang dilaksanakan di YAPTI pada bulan Mei 2017 dengan tujuan agar pemberdayaan baik berupa keterampilan maupun modal usaha tidak disalah gunakan. Kegiatan pembinaan penyandang disabilitas eks kusta, Dinas Sosial Kota Makassar mengundang Dinas Koperasi sebagai pemateri, dengan membawakan materi tentang pemberian label suatu produk. Dengan demikian penyandang disabilitas yang sudah mampu memproduksi sendiri dapat memberikan label produksinya. Dengan pemberian label pada produk diharapkan dapat meningkatkan nilai jual dari hasil produksi daur ulang. Selain itu dalam pendampingan ini pun diharapkan penyandang disabilitas yang telah di berikan pemberdayaan dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga nantinya mereka mampu keluar dari keadaan yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya.

Dinas Sosial Kota Makassar selama berkoordinasi memberdayakan penyandang disabilitas fisik belum ada kendala yang dihadapi. Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam berkoordinasi sehingga terjalin hubungan yang baik, maka Dinas Sosial Kota Makassar akan melakukan persuratan Kepada pihak yang akan diberikan pemberdayaan misalnya Kepada Camat Tamalate memberikan laporan kepada pemerintah setempat bahwa akan diadakan kegiatan pelatihan keterampilan khusus untuk warganya penyandang disabilitas eks kusta di Komplek Kusta Jongaya Dangko Kelurahan Balang Baru.

Dalam berkoordinasi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar melauli telpon, via sms dan persuratan dalam hal laporan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan di wilayah pemerintah setempat. Kesadaran akan pentingnya koordinasi perlu ditingkatkan karena dalam memberdayakan penyandang disabilitas fisik, Dinas Sosial Kota Makassar melakukan pendekatan hubungan emosional kepada penyandang disabilitas fisik. Mengingat perasaan penyandang disabilitas fisik sangat sensitif sehingga nantinya tidak akan terjadi diskriminasi terhadap mereka. Tingkat partisipasi penyandang disabilitas fisik dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan melalui keterampilan sangat tinggi, karena mereka begitu antusias. Hubungan yang dijalin pun sangat baik mengingat kedekatan Dinas Sosial Kota Makassar dengan penyandang disabilitas fisik salah satunya penyandang disabilitas fisik eks kusta di dangko. Perlu diketahui pula bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas eks kusta dari 700 penyandang disabilitas hanya 100 penyandang disabilitas yang diperdayakan, sehingga pemberdayaan penyandang disabilitas

fisik belum secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan kurangnya anggaran yang dibatasi oleh pagu anggaran.

Bentuk Koordinasi BSU dangko mandiri dan BSP, bank sampah pusat sesuai dengan tupoksinya melakukan penjemputan sekali dalam sebulan setelah jumlah sampah banyak. Setelah dilakukan penjemputan keesokan harinya ketua bank sampah unit akan datang ke bank sampah pusat untuk mengambil uang dengan syarat cukup membawa stempel bank sampah unit dangko mandiri. Selain koordinasi dengan BSP, bank sampah unit juga berkoordinasi dengan YPN dalam hal YPN mengontrol masih berjalan atau tidaknya bank sampah unit. Selain itu pada bulan Maret 2017 diadakan pertemuan bank sampah dengan YPN di Kecamatan. Serta pada bulan 11 2016 YPN melakukan penyuluhan dan memeriksa pembukuan bank sampah unit.

Adapun tanggung jawab bank sampah unit dalam hal ini mengenai keuangannya. Setelah produk sampah di timbang dan di jemput oleh BSP selanjutnya BSU dtang ke BSP untuk mengambal hasil dari pembelian produk sampah mereka. Kemudian hasil tersebut ada yang langsung diberikan kepada nasabah tetapi ada pula nasabah yang tidak mengambilnya langsung atau ditabung dulu. Keuangan bank sampah unit dikelola sendiri oleh bank sampah unit termasuk bank sampah unit dangko mandiri.

Tugas dan wewenang bank sampah unit dalam hal ini melakukan penimbangan sampah nasabah, kemudian melakukan pemilahan-pemilahan sampah sebelum penjemputan sampah oleh bank sampah pusat. Penimbangan di bank sampah unit dangko mandiri dilakukan setiap hari jumat. Bentuk komunikasi yang dilakukan dalam berkoordinasi, melalui via telpon atau sms kepada pihak bank sampah pusat untuk melakukan penjemputan.

Terkait dengan koordinasi Yayasan Peduli Negeri lebih kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, namun tidak dipungkiri juga bahwa Yayasan Peduli Negeri berkoordinasi dengan seluruh SKPD Kota Makassar. Merujuk pada perwali yang mewajibkan semua pegawai negeri, pegawai honorer dan pegawai kontrak untuk menabung sampah. Artinya semua instansi di Kota Makassar turut serta dalam kegiatan bank sampah. Hal ini bertujuan bahwa tidak hanya masyarakat yang dituntut untuk sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan bebas dari sampah dan juga turut dalam mengurangi jumlah volume sampah di TPA. Dalam berkoordinasi dengan instansi lain maupun masyarakat, saling bertukar pikiran dan mengeluarkan pendapat, bukan hanya

pemerintah yang mengeluarkan pendapat tetapi masyarakat dan pengurus bank sampah untuk mengeluarkan pendapat. Dengan tujuan pengembangan bank sampah kedepannya lebih baik lagi. Untuk mensukseskan program bank sampah maka seluruh instansi pemerintah atau swasta, dan masyarakat termasuk Yayasan peduli Negeri harus saling berkoordinasi dan bersinergi. Sehingga kedepannya bank sampah mampu memberdayakan masyarakat termasuk penyandang disabilitas yang terlibat dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat mensejahterahkan pengelolanya, nasabahnya dan masyarakatnya. Keberadaan bank sampah selain mensejahterahkan dalam ekonomi juga berorientasi lebih kepada lingkungan untuk mengurangi timbulnya sampah di Kota Makassar.

Peran Yayasan Peduli Negeri dalam pengelolaan bank sampah lebih kepada pendampingan, edukasi dan sosialisasi. Terkait pendampingan, edukasi dan sosialisasi Yayasan Peduli Negeri melakukan penguatan kepada masyarakat dengan mengajak masyarakat yang belum mau menjadi mau mengelola sampah. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak-dampak yang dapat ditimbulkan oleh sampah, baik dampak positif maupun negative ketika mengelola dan tidak mengelola. Dampak positif dari pengelolaan sampah dapat di daur ulang menjadi barang yang ekonomis sedangkan dampak negatifnya itu pencemaran lingkungan. Pemberian pemahaman tentang dampak-dampak tersebut diharapkan mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih aktif untuk turut serta mengelolah sampah bahwa ketika sampah diolah akan lebih memiliki nilai yang bermanfaat dibandingkan dengan tidak diolah akan memberikan banyak kerugian bagi lingkungan bahkan terhadap masyarakat sekalipun dapat merasakan kerugiannya.

Fungsi dari Yayasan Peduli Negeri melakukan pendampingan program bank sampah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi terkait sampah dan pengelolaannya. Tanggung jawab Yayasan Peduli Negeri pun lebih kepada memaksimalkan dalam pemberian pemahaman ke masyarakat yang belum memiliki bank sampah ataupun yang sudah memiliki bank sampah. Bagi yang sudah memiliki bank sampah akan lebih ditingkatkan kapasitas pengelolaan bank sampah tersebut dengan melakukan pelatihan daur ulang sampah, pelatihan administrasi dan manajemen bank sampah. Di masyarakat sendiri banyak yang menganggap bahwa bank sampah sama halnya dengan pengepul, padahal sangat berbeda antara pengepul dan bank sampah. Di bank sampah sendiri manajemen pengelolaannya memiliki yang namanya nasabah, susunan pengurus bank sampah, dan penerima produk dalam hal ini bank sampah pusat, sedangkan pengepul tidak memiliki tiga unsure manajemen pengelolaan sampah tersebut. Sehingga semaksimal mungkin

memberikan sosialisasi, edukasi dan pendampingan di masyarakat yang telah memiliki bank sampah ataupun belum memiliki bank sampah.

Di Kota Makassar sendiri belum semua memiliki bank sampah, maka disinilah fungsinya YPN memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat termasuk penyandang disabilitas fisik untuk memberikan mereka kesempatan berpartisipasi dalam masyarakat, berkoordinasi dengan pihak kecamatan yang melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan pihak dari YPN ataupun Dinas Lingkungan Hidup sebagai pemateri tentang bank sampah dan pengelolaannya. Hal yang pertama dilakukan sosialisasi sebelum melakukan edukasi dengan memberikan pemahaman tentang bank sampah, setelah diberikan sosialisasi selanjutnya masyarakat sendiri yang akan menentukan untuk membantu bank sampah atau tidak. Kemudian setelah dibentuk bank sampah maka dilakukan edukasi tentang pemahaman produk-produk sampah yang dibeli oleh bank sampah pusat, manajemen dan administrasi pengelolaan bank sampah serta mengedukasi tentang dampak-dampak negatif yang dapat ditimbulkan sampah. Jadi diharapkan dengan adanya sosialisasi dan edukasi tentang bank sampah dan pengelolannya diharapkan masyarakat termasuk penyandang disabilitas fisik dibalik kekurangannya tidak lagi membuang sampah sembarangan. Pemberdayaan dengan mengubah pola pikir dan mengikutsertakan penyandang disabilitas fisik dalam kegiatan bank sampah dan pengelolaannya diharapkan akan mampu mengangkat harkat dan martabat kelompok penyandang disabilitas bahwa di balik kekurangan mereka mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat salah satunya dalam menangani masalah persampahan di Kota Makassar.

Perlu diketahui bahwa pengurus-pengurus bank sampah di Kota Makassar tidak diberikan intensif oleh Pemerintah ataupun Yayasan Peduli Negeri, sehingga dapat dikatakan pengurus bank sampah ini menggaji dirinya sendiri melalui program bank sampah ini. Jadi bentuk pemberdayaan penyandang disabilitas fisik melalui bank sampah dilakukan melalui manajemen keuangannya itu sendiri. Misalnya dalam pembelian sampah di bank sampah unit dengan bank sampah pusat memiliki selisih, contohnya pembelian gelas aqua oleh bank sampah unit dari nasabah seharga dua ribu rupiah sedangkan produk dari bank sampah unit dibeli oleh bank sampah pusat dengan harga enam ribu rupiah maka ada selisih sebanyak empat ribu rupiah. Jadi selisih empat ribu rupiah inilah yang disimpan dan dikelola dengan sebaik mungkin untuk dilakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan daur ulang menjadikan produk sampah yang

memiliki nilai jual yang lebih. Karena pada dasarnya program bank sampah bertujuan untuk memberdayakan masyarakat termasuk penyandang disabilitas fisik, karena masyarakat sendiri yang mengelolanya maka masyarakat sendiri yang menikmati hasilnya. Begitupun dengan bank sampah dangko mandiri di komplek penyandang disabilitas eks kusta, mereka yang mengelola bank bank sampah maka mereka sendiri yang menikmati hasilnya.

Partisipasi masyarakat terhadap program bank sampah dapat dikatakan meningkat, hal ini dapat dilihat pada tahun 2011 hanya ada sekitar 10 bank sampah, seiring berjalan waktu sampai pada tahun 2014 sudah ada sekitar 50 bank sampah dan barulah pada tahun 2015 program bank sampah ini dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena dukungan pemerintah, Yayasan Unilever Indonesia dan Yayasan Peduli Negeri. Sehingga dengan adanya koordinasi yang berjalan baik oleh pihak pemerintah, swasta, organisasi masyarakat (YPN) serta masyarakat itu sendiri. Dengan berjalan koordinasi yang baik bukan hanya mensukseskan program bank sampah tetapi juga telah memberdayakan masyarakat melalui program bank sampah.

Adanya peningkatan partisipasi masyarakat serta turut berpartisipasi penyandang disabilitas fisik dalam program bank sampah, menunjukkan kemauan masyarakat itu sendiri untuk membentuk bank sampah karena perlu diketahui dalam pembentukan bank tidak ada intervensi dari siapapun ke masyarakat untuk membentuk bank sampah. Jika dulu awalnya adanya bank sampah pihak Yayasan peduli negeri yang mengajak masyarakat untuk membentuk bank sampah tetapi sekarang sudah sebaliknya masyarakat yang memanggil untuk membentuk bank sampah. Ini merupakan salah satu *reward* bahwa sudah ada kesadaran diri sendiri dari masyarakat tentang permasalahan sampah di kota Makassar. Termasuk bank sampah dangko mandiri yang baru terbentuk tahun 2016 pengurusannya melibatkan penyandang disabilitas fisik, ini menunjukkan secara perlahan penyandang disabilitas fisik sadar akan permasalahan sampah di Kota Makassar. Perubahan dapat dari skala kecil terlebih dahulu yaitu lingkungan masyarakat sendiri yang dulunya sebelum ada bank sampah, sampah berserakan dan setelah ada bank sampah memotivasi mereka mengumpulkan sampah untuk di bawa ke bank sampah.

Pada bulan tiga 2016 pihak YPN memberikan sosialisasi tentang bank sampah kepada penyandang disabilitas fisik di Dangko dalam kegiatan Gemar MTR untuk meningkatkan kembali tentang manajemen pengelolaan bank sampah. Pada bulan 11

2016 dan bulan 2 2017 dilakukan penyuluhan pemeriksaan buku administrasi bank sampah, memantau perkembangan pengelolaan bank sampah dangko mandiri, serta memberikan motivasi kepada bank sampah unit untuk kedepannya bank sampah bisa dikelola dengan baik agar menjadi bank sampah yang produktif yang dapat memberdayakan msyarakat termasuk penyandang disabilitas fisik.

Terkait koordinasi produksi daur ulang sampah, ada beberapa dinas yang membantu membawahi produk daur ulang seperti dinas koperasi, dinas pariwisata, dan disperindag. Dinas koperasi memberikan bantuan berupa modal untuk mengelola dan memasarkan produk daur ulang sampah. Kemudian dari dinas pariwisata dan disperindag memberikan pelatihan pengepakan produk yang siap dijual. Semakin banyak SKPD yang berkoordinasi terutama dalam pemeasaran dan promosi produk daur ulang sampah dapat memungkinkan produk daur ulang tersebut dapat dipasarkan secara besar dan bersaing dengan produk-produk lainnya dipasaran.

## **5.2 Promosi dan pemasaran produk pengelolaan sampah penyandang disabilitas fisik dalam mengimplementasikan program 3R melalui Bank Sampah di Kota Makassar**

Tanggung jawab UPTD dalam pemasaran produk sampah, UPTD daur ulang sampah berkoordinasi dengan vendor perusahaan daur ulang Kota Makassar yang dianggap besar. UPTD daur ulang sampah memilih vendor yang menawarkan harga produk sampah yang tinggi dan juga memperhatikan vendor yang dapat mencairkan dananya dalam satu atau dua hari. Karena pada dasarnya penetapan harga produk sampah di bank sampah unit ditentukan ataupun tergantung dari vendor karena sampai sekarang belum ada standar ketetapan harga dari pemerintah. Mekanisme pemasaran produk bank sampah, jika sampah dari bank sampah unit telah dipilah maka itu sudah menjadi produk. Karena sudah dapat dijadikan produk bahan baku pembuatan plastik. Setelah dipilah di BSU selanjutnya BSP datang menjemput produk di BSU. selanjutnya setelah di BSP maka aka ada vendor yang membeli produknya. UPTD daur ulang sampah telah banyak bekerjasama dengan vendor-vendor di Kota Makassar, misalnya ; *mlarahmah*, dan usaha dagang Celebes agung niaga. Belum adanya penetapan harga sampah dari pemerintah mengakibatkan sering terjadinya perubahan harga yang tidak menentu, hal inilah yang membuat BSP harus mencari vendor yang dapat memberikan harga dengan tujuan demi kepentingan bank sampah unit sendiri karena yang akan menikmati hasilnya dari bank sampah unit sendiri.

Dinas Sosial Kota Makassar dalam pemasaran hasil keterampilan mendaur ulang sampah penyandang disabilitas fisik seperti keset kaki, bros, dan sebagainya, dalam produksinya itu harus difasilitasi. Sebagai fasilitator Dinas Sosial Kota Makassar hanya memberikan pembinaan agar usahanya meningkat, pembinaan pemberian label pada produk. Dalam kegiatan pembinaan tersebut Dinas Sosial mengundang Dinas perindustrian sebagai narasumber. Dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial hanya memfasilitasi pemasran dengan hanya memberikan pembinaan bukan dalam bentuk pengarahan langsung tempat untuk memasarkan produk keterampilan penyandang disabilitas fisik. Sehingga pada kenyataannya penyandang disabilitas fisik menjual sendiri atau mencari sendiri mitra seperti ibu Rahmatiah yang menjual hasil produk daur ulang di Café Mella dan ibu halimah menjual hasil keset kaki hanya kepada kerabat. Hal ini terjadi karena pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Makassar.



**Gambar 1. Produk Daur Ulang Sampah Penyandang Disabilitas Eks Kusta Di Pameran MC Expo 2017**

Pemasaran produk masih dilakukan dengan cara pemesanan. Jika ada yang memesan baru akan dibuatkan. Untuk menarik pembeli maka sampel daur ulang sampah di letakkan di bank sampah pusat dan di bank sampah unit. Karena jika produk daur ulang diletakkan di bank sampah unit diharapkan dapat menarik minat masyarakat ataupun pengunjung untuk membelinya. Selain pemasaran melalui pemesanan dan meletakkan sampel daur ulang di bank sampah maka promosi produk daur ulang juga dilakukan dengan diikutkan pada event-event seperti pada kegiatan MC Expo tahun 2017 dan event lainnya pada tahun 2008 dalam kegiatan *Trial Traction*. Tujuan di ikutkan event selain untuk mempromosikan produk daur ulang juga untuk memberikan pemahaman bahwa sampah dapat di daur ulang untuk mengangkat nilainya. Jika dilihat dari sisi bank sampahnya bahwa sampah yang ada disana sudah memiliki nilai jual karena dibeli oleh vendor. Untuk mengangkat nilainya lebih tinggi maka di daur ulang kembali.



**Gambar.2 Produk Daur Ulang Sampah, Bros, Tempat Toples, Tempat Sendok**



**Gambar 3. Promosi Produk Daur Ulang Sampah MC Expo 2017  
(BANK SAMPAH PUSAT)**

Meski pemasaran tidak terlalu besar tetapi sudah ada beberapa masyarakat yang membelinya, ini menunjukkan fakta bahwa masih kurangnya minat dari masyarakat untuk menggunakan produk dari daur ulang sampah. Seperti lembaga penelitian datang berkunjung di bank sampah pusat dalam rangka kegiatan terkait masalah lingkungan. Turis dari Jepang ini membeli empat produk daur ulang sampah yakni tempat tissue, dompet, vas bunga dan souveri berupa bros. Selain dari Jepang ada pula dari Jakarta yakni Dewan Persampahan Nasional dalam rangka survei terkait pengelolaan sampah di Kota Makassar, Dewan Persampahan ini membeli produk daur ulang sampah berupa souvenir bros.

Terkait masalah produk daur ulang sampah yang belum dipasarkan secara besar karena kendala masih kurangnya minat masyarakat memakai produk sampah selain itu sumber daya untuk membuatnya terbatas, pembuatannya juga sangat rumit. Misalnya pembuatan bros dari kantong plastic dalam sehari hanya bisa menyelesaikan sebanyak 1-2 bros. jika dilihat dari harganya pun terjangkau dan motif maupun modelnya sangat menarik dan beragam harganya pun mulai dari Rp 5000 – Rp.7500.



**Gambar.4 Produk Daur Ulang Sampah ( Bank Sampah Pusat)**

Pemasaran terkait daur ulang sampah masih sangat sulit, karena factor masih sulit masyarakat untuk menggunakan produk daur ulang. Jadi salah satu cara pemasaran dari orang ke orang. Kedua melalui social media melalui akun facebook, instagram ataukah melalui grup lapas sumbereta, serta grup mall bank sampah. Semua gambar produk daur ulang sampah di upload ke media sosial dan grup yang telah dibentuk. Pemasaran secara online pun sudah berjalan dengan baik. Selain pemasaran melalui media sosial pemasaran dilakukan ke ranah kelurahan misalnya ibu-ibu PKK maka nantinya akan di promosikan ke kader-kader PKK dan ibu rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memasarkan produk daur ulang sampah harus memiliki strategi, melihat minat masyarakat masih sangat kurang terhadap produk daur ulang sampah. Maka dibuatlah strategi pembuatan produk tanpa memperlihatkan bahwa produk tersebut terbuat dari sampah, pemasarannya pun dilakukan secara beragam untuk menarik minat pembeli. Pemasaran juga dilakukan melalui Dekranasda, misalnya eceng gondok yang dibuat oleh pengrajin di dangko. Pemasaran produk melalui media sosial bertujuan agar pemasaran tidak hanya di dalam di dalam Kota Makassar tetapi dapat dipasarkan ke luar daerah bahkan keluar Sulawesi. Pemasaran sudah pernah dilakukan ke luar Sulawesi di NTT oleh angkatan laut memesan sebanyak dua lusin tempat tissue, selain itu dari luar daerah pun yaitu dari pare-pare juga memesan tempat tissue sebanyak satu lusin.

Selain melalui pemasaran-pemasaran diatas, pemasaran dan promosi juga dilakukan melalui event-event baik event nasional maupun internasional, event nasional dikutkan dalam kegiatan MC Expo 2017, MC Expo 2016, Festival F8 2016, Green and Clean 19 Mei 2017 serta event internasional diadakan di NTT Festival Komodo art pada Agustus 2016. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kendala pemasaran masyarakat masih belum bisa menerima atau memakai produk daur ulang sampah. Pada bulan Maret 2017 diadakan

sosialisasi di Dinas Lingkungan Hidup tentang daur ulang bersama SKPD dan Camat-Camat sekaligus mencari solusi agar masyarakat mau menerima dan memakai produk daur ulang sampah, maka solusinya pemerintah dan seluruh SKPD nantinya diwajibkan untuk memakai produk daur ulang sampah. Langkah ini diambil untuk memulai mempromosikan produk daur ulang ke masyarakat. Diharapkan kedepannya jika pemimpin yang sudah mulai memakai produk daur ulang diharapkan pula masyarakat akan mulai menggunakannya pula. Hal ini dimaksudkan jika masyarakat sudah mulai minat dan mau menggunakan produk daur ulang maka diharapkan volume sampah yang dibuang ke TPA dapat berkurang dengan adanya pengelolaan sampah di bank sampah dan dijadikan produk daur ulang.



**Gambar 5.Pameran Pakaian dari Daur Ulang Sampah (MC Expo 2017)**

Yayasan peduli negeri tidak pernah terlibat dalam pemasaran tetapi lebih kepada pendampingan kepada Bank Sampah Pusat, karena yayasan peduli negeri tidak boleh masuk ke dalam ranah pemasaran. Pemasaran sepenuhnya merupakan wewenang Bank sampah pusat, bank sampah unit dan vendor. Yayasan peduli negeri hanya sebatas melakukan pengarahannya misalnya mengarahkan bank sampah pusat untuk memilih vendor

yang dapat membeli produk sampah dengan harga tinggi, karena ini untuk kepentingan nasabah dan pengurus bank sampah unit itu sendiri. Meski tidak terlibat langsung dengan pemasaran, akan tetapi YPN dapat memfasilitasi bank sampah unit jika meminta untuk diberikan pelatihan daur ulang sampah dengan tujuan untuk mengangkat nilai dari sampah setelah di daur ulang. Seperti yang telah dilakukan di komplek penderita eks Kusta pemberian pelatihan daur ulang dari Koran dan pelatihan pembuatan produk daur ulang dari eceng gondok. Harapan dengan adanya pengelolaan bank sampah diharapkan ekonomi jalan dan lingkungannya mulai bebas dari sampah.

Selain kendala pemasaran dalam masyarakat masih belum menerima produk daur ulang, juga karena masih kurangnya promosi. Segala upaya telah dilakukan untuk mempromosikan dan memasarkan produk daur ulang sampah mulai dari individu satu ke individu lainnya, melalui media sosial, masuk ke ranah ibu-ibu PKK dan di ikutkan dalam berbagai event baik tingkat nasional maupun internasional. Namun masih belum cukup mendorong pemasaran yang besar bagi produk daur ulang sampah, yang diharapkan selain mendapatkan hasil ekonomi dari bank sampah tetapi juga mendapatkan hasil dari daur ulangnya dan juga dampak bagi lingkungannya. Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang harus dipecahkan bersama, melalui koordinasi antar instansi dalam pemasaran dan mempromosikan produk daur ulang sampah masyarakat tak terkecuali produk daur ulang yang diproduksi oleh penyandang disabilitas fisik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Supriyanto, dkk. 2009. *Potret Pemenuhan Hak atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PUSHAM UII
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. 2010.
- Disabled World.23 Desember 2009.*Definitions of Disability*.<http://www.disabledworld.com/definitions/disability-definitions.php> .diakses 14 Maret 2015, pukul 18.04 WIB.
- Fredman. 1992. *Empowerment : The Politics of Alternative Development*. Cambridge : Blackwell.
- General Election Network For Disability Acces. *Sekilas Tentang Disabilitas*. 2013. <http://www2.agendaasia.org/index.php/id/informasi/sekilas-tentang-disabilitas/102-sekilas-tentang-disabilitas>.diakses 14 Maret 2015, pukul 19.15 WIB.
- Gunawan, Adisaputro. 2010. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Cetakan Kedelapan belas. BPFE Yogyakarta : Yogyakarta
- Handayani.1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. PT. Eresco. Jakarta
- Hasibuan, Malayu S.P., 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Cetakan 9. PT. Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Ife. 1995. *Community Development : Creating Community Alternative, Vision Analysis and Practice*. Longman : Australia.
- Kotler, Philip dan Gary Armstrong. 2008. *Prinsip-prinsip pemasaran*. Edisi Keduabelas. Jakarta: Erlangga
- Lai, Hubert. 2009. *Peran Camat Dalam Koordinasi Pembangunan Daerah Pada Kecamatan Manganitu Kepulauan Sangihe*, Makassar. STIA LAN

- Magfira Dwi. 2011. *Analisis Pengaruh Harga dan Promosi Terhadap Peningkatan Penjualan Tiket PT. Maniela Tour dan Travel Makassar*. **Skripsi**. Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar.
- Michael, Rey. 1982. *Perancangan Strategi Pemasaran*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Gramedia Jakarta.
- Payne, Malcom. 1997. *Modern Social Work Theory, Second Edition*. London : Mac Milan Press Ltd.
- Prijono dan Pranarka. 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : CSIS.
- Putri, Megayani. 2014. *Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dalam Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Penderita Intellectual Disability di Kampung Idiot*. Jomban.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Remaja Rosdakarya.
- Suharto, Edi. 2008. *Kajian Penerapan Pelayanan Khusus (Service for Costumer with Special Needs. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus disampaikan pada Focused Group Discusion*. Bogor : Sahini Batik Hotel.
- Sulastri, Andi. 2014. *Tinjauan Hukum terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*. Makassar.
- Swasta, Basu dan T. Hani Handoko. 2000. *Manajemen Pemasran Analisa Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Liberty.
- Tompo, Rusdin. *Masa DePan Makassar (dinamika Demokrasi dan Pemerintahan)*. 2014. Makassar :Badan arsip, perpustakaan dan Pengolahan Data.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

## LAMPIRAN 1 JUSTIFIKASI ANGGARAN

<b>1. Honorarium</b>					
<b>Honor</b>	<b>Honor/jam (Rp)</b>	<b>Waktu (Jam/minggu)</b>	<b>Minggu</b>	<b>Honor per Tahun(Rp)</b>	
				<b>Tahun ke-1</b>	<b>Tahun ke-2</b>
Ketua	18.000	15	4	11.250.000	11.250.000
Anggota Peneliti 1	9.750	15	4	6.500.000	6.500.000
<b>Subtotal (Rp)</b>				<b>17.750.000</b>	<b>17.750.000</b>
<b>2. Pembelian bahan habis pakai</b>					
<b>Material</b>	<b>Justifikasi pembelian</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Harga satuan (Rp)</b>	<b>Harga peralatan penunjang (Rp)</b>	
				<b>Tahun ke-1</b>	<b>Tahun ke-2</b>
Kertas A4 70 gr		10	30.000	300.000	300.000
Tinta Printer		10	25.000	250.000	270.000
Biaya komunikasi		12 bln	100.000/bln	1.000.000	1.000.000
Biaya tidak terduga		Pm	1.620.000	1.000.000	1.000.000
Catridge printer canon IP I900	Mecetak proposal, laporan, angket, dll	4	150.000	600.000	600.000
Catridge printer canon IP I900 (warna)	Mecetak proposal, laporan, angket, dll	2	190.000	380.000	380.000
Harddisk Eksternal	Penyimpanan data	1	500.000	500.000	500.000
CD Blank	Penyimpanan data	10	5.000	50.000	50.000
Penyusunan Proposal		5 exp @	25.000	125.000	125.000
Pengumpulan data		40x2@	10.000	800.000	700.000
Penyusunan Laporan Akhir		5 exp@	350.000	1.668.000	1.175.000
Analisis Data		1 paket	2.500.000	1.000.000	1.000.000
FGD dan Pertemuan		3 paket	2.500.000	3.518.800	5.000.000
Aplikasi dan Uji Coba Model		2 kali	2.500.000	3.000.000	4.000.000
Lain-lain Kebutuhan analisis				3.475.000	3.500.000
<b>Sub total (Rp)</b>				<b>16.666.800</b>	<b>19.600.000</b>

<b>3. Perjalanan</b>					
<b>Material</b>	<b>Justifikasi Perjalanan</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>	<b>Biaya per Tahun (Rp)</b>	
				<b>Tahun ke-1</b>	<b>Tahun ke-2</b>
Kota Makassar	Seminar penelitian dan pertemuan	2 kali	2.500.000	3.000.000	4.000.000
7 Kecamatan di kota Makassar	Survei	Insidental	1.500.000	2.430.000	4.050.000
7 Kecamatan di Kota Makassar	Pertemuan Uji Coba Model	1 Kali	1.500.000	2.000.000	2.000.000
Perjalanan non kwitansi				470.000	1.600.000
<b>Subtotal (Rp)</b>				<b>7.900.000</b>	<b>11.650.000</b>
<b>4. Sewa</b>					
<b>Material</b>	<b>Justifikasi Sewa</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>	<b>Biaya per Tahun (Rp)</b>	
				<b>Tahun ke-1</b>	<b>Tahun ke-2</b>
Publikasi artikel jurnal nasional tidak terakreditasi		1x50@ peserta	50.000	2.183.200	3.000.000
Publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi		1 eks@	7.500.000	5.500.000	10.000.000
Publikasi/artikel jurnal regional tidak terindeks		1 eks@	5.500.000	5.500.000	15.000.000
<b>Subtotal (Rp)</b>				<b>7.683.200</b>	<b>28.000.000</b>
<b>TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SETIAP TAHUN (Rp)</b>				<b>50.000.000</b>	<b>77.000.000</b>
<b>TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SELURUHNYA (Rp)</b>				<b>127.000.000</b>	

#### **LAMPIRAN 2 :SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

1. Tape Recorder sebagai alat perekam yang akan disewa
2. Kamera Digital juga akan disewa
3. Buku catatan
4. Pinjam pakai laptop
5. Pembelian catridge karena sarana printernya sudah dipunyai

6. Sewa kendaraan roda empat sebanyak 1 (satu) unit selama melakukan survey
7. Sewa kendaraan roda dua sebanyak 2 (2) unit sebagai sarana bantu pada saat pengumpulan data lapangan dan survey
8. Sewa ruangan pada saat dilakukan pertemuan dan Focus Group Discussion (FGD)
9. Bahan-bahan dan sarana lain yang diperlukan di dalam pelaksanaan penelitian akan dilakukan pinjaman pada saat dilakukan penelitian termasuk di dalamnya adalah ruang dalam rangka pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)

**LAMPIRAN 3 : SUSUNAN ORGANISASI TIM PENGUSUL DAN PEMBAGIAN TUGAS**

No.	Nama/NIDN	Instansi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1.	Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si NIDN: 0905068003	Fak.Sospol	Administrasi Publik	10 jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkoordinir pelaksanaan dan penyiapan pelaksanaan Peneliti</li> <li>• Memimpin dan melakukankoordinasi TIM Peneliti dan seluruh tenaga pendukung yang akan dilibatkan dalam penelitian</li> <li>• Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional dan persiapan TIM</li> <li>• Bersama TIM pendamping mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap strategi efektifitas pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data dan penulisan laporan</li> <li>• Mengkoordinir pembuatan laporan penelitian</li> </ul>
2.	Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si	Fak.Sospol	Administrasi Negara	8 jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu dan bertanggung jawab kepada Ketua TIM dalam pelaksanaan dan penyiapan pelaksanaan penelitian</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi dan menjadi koordinator dalam persiapan survey dan observasi serta pengumpulan data bidang model pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas</li> <li>• Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap analisis bidang model pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dalam rangka penyempurnaan kegiatan</li> <li>• Bersama Ketua TIM dan pendukung lainnya mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap strategi pelaksanaan</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

**LAMPIRAN 4 : MOU TIDAK ADA****LAMPIRAN 5 : BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM PENGUSUL****A. Identitas Diri Ketua Peneliti**

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si
2	Jenis Kelamin	P
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	1031102
5	NIDN	0905068003
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Jeneponto, 06 Mei 1980
7	E-mail	<a href="mailto:nuryantimustari@gmail.com">nuryantimustari@gmail.com</a>
8	Nomor Telepon/HP	0411-8211295/081355584880
9	Alamat Kantor	Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar
10	Nomor Telpon/Faxs	0411-866972/0411-865588
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= 47 Orang ; S-2 = 8 Orang; S-3 = Orang
12	Mata Kuliah yang Diampuh	1. Ekonomi Politik Pemerintahan
		2. Analisis Kebijakan Publik

**B. Riwayat Pendidikan**

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UNHAS Makassar	UNHAS Makassar	UNM Makassar
Bidang Ilmu	Ilmu Pemerintahan	Administrasi Pembangunan	Administrasi Publik
Tahun masuk-lulus	1998-2002	2002-2004	2005-2010
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Hubungan Kerja Eksekutif	Analisis Sistem Informasi Manajemen dalam	Analisis Implementasi Kebijakan

	dengan Legislative di Kabupaten Bulukumba (Studi Tentang Proses Penetapan APBD )	Perencanaan di Kabupaten Bulukumba	Peningkatan Kompetensi Pendidik di Kabupaten Jeneponto
Nama Pembimbing/Promotor	Prof.Dr.Hafied Changara dan Drs. Hasrat Arief, M.S	Prof.Dr.H.Rakhmat, M.Si dan Dr.Nursadik, M.MP	Prof.Dr. Jonathan Salussu, MA, Prof.Dr.H.Andi Makkulau, dan Prof. Dr.Amir Imbaruddin. M. DA, Ph.D

### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp )
1	2010	Analisis implementasi manajemen mutu terpadu (MMT) pada system pelayanan administrasi di unismuh Makassar	Unismuh	3.000.000
2	2011	Koordinasi Pemerintah dalam Distribusi	Unismuh	2.000.000

		Bantuan Beras Miskin di Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara		
3	2011	Tata Kelola Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa di Desa Parinding Kecamatan Barang Kabupaten Enrekang	Unismuh	2.000.000
4	2012	Uji Kebijakan Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa	Unismuh	2.000.000
5	2014	Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Mengartikulasi dan Mengagregasi Kepentingan Perempuan di DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Unismuh	2.500.000
6	2014	Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Daerah Berbasis Unggulan dan Berdaya Saing	Dikti	70.000.000
7	2016	Pengembangan Model Pemberdayaan	Dikti	50.000.000

		Penyangng Disabilitas Fisik dalam implementasi program 3R melalui bank sampah di Kota Makassar		
8	20			

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2011 - sekarang	Asessor BAP-S/M Provinsi Sulawesi Selatan	APBN	40.000.000
2	2013-2014	Mentor/Pendamping Madrasah, kerja sama Kementrian Pendidikan Indonesia dan Australia (SSQ C <sub>3</sub> )	DFAT Australia	45.000.000
3	2015	Trainer “Bedah Instrumen Akreditasi Madrasah Kabupaten Wajo”	MDC Prop. Sulsel	2.000.000

**E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Intervensi Politik dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat (Tinjauan terhadap Pelaksanaan Rekrutmen dan promosi pegawai)	Jurnal Ibnu Khaldum	Volume VI edisi ke-2 Juli 2011
2	Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik melalui peningkatan rasio pendidik dan	Jurnal OTORITAS	Volume 1 No. 1 April 2011

	pemerataan penyebaran pendidik di Kabupaten Jeneponto		
3	Kualitas Pelayanan Kesehatan dalam perspektif <i>New Public Service</i>	Jurnal Ibnu Khaldum	Volume VII Edisi ke- 3 November 2012
4	Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidik melalui Diklat di Kabupaten Jeneponto	Jurnal Ibnu Khaldum	Volumen VIII Edisi ke -1 Maret 2013
5	Public Participation in the development of leading sector of agriculture and fisheries in Pangkep Regency	Mediterranean Journal of Social Science	Vol 6 No.6, November 2015
6	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa	Jurnal Ibnu Khaldum	Volume 11 No.2, Juli 2016

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Nama Temu ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
----	-----------------------------	----------------------	------------------

1	Latihan kepemimpinan Pemerintah Tingkat Madya Nasional (Kongres Nasional Fokkermapi Ilmu Pemerintahan)	Sistem pemerintahan Indonesia	Novemper 2010, di LEC Makassar, November 2010
2	Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan	Peningkatan Basic Keorganisasian	November 2010 Aula SLB Makassar
3	Seminar pelayanan public	Efektifitas dan Efesiensi Pelayanan Publik	April 2011 di Kantor Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa
4	Lokakarya Penulisan Proposal Penelitian Dan Penulisan Skripsi	Penulisan Tinjauan Pustaka, Teori Dan Daftar Pustaka	Agustus 2011 di Hotel Clarion Makassar
5	Seminar Politik Perempuan	Telaah Kritis Perpolitikan di Indonesia dan Solusinya	Mei, 2011, di Auditorium Al-Amin Unismuh Makassar
6	Seminar Kecamatan	Sinergitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan di Kecamatan Pattalassang kab. Takalar	April 2011, aula Bappeda Kabupaten Takalar

#### **G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Implementasi Kebijakan Publik	2013	285	Membumi Publishing
2	Pemahaman Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik	2015	306	Leutikapro, Yogyakarta

#### H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				

#### I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat

#### J. Penghargaan dalam 10 tahun (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Wisudawan Terbaik I Tingkat Universitas	Universitas Hasanuddin	2011
2	Peringkat Pertama pada Pelatihan Asessor Jenjang SMP/MTs	Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M)	2011
3	Peringkat III ToT Asessor Sekolah/Madrasah Tingkat Nasional.	Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Jakarta	2012

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat di pertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penugasan Penelitian Produk Terapan Tahun Anggaran 2017.

Makassar, 13 Desember 2016

Ketua Pengusul

**Dr. Nuryanti Mustari, S. IP, M.Si**

NIDN 0905068003

### A. Identitas Diri Anggota Peneliti (1)

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
2	Jenis Kelamin	P
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	730727
5	NIDN	0915057101
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Ujung Pandang, 15 Mei 1971
7	E-mail	<a href="mailto:ihyaniislahuddin@yahoo.co.id">ihyaniislahuddin@yahoo.co.id</a>
8	Nomor Telepon/HP	081342550857
9	Alamat Kantor	Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar
10	Nomor Telpon/Faxs	0411-866972/0411-865588
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= 67 Orang ; S-2 = 13 Orang; S-3 = Orang
12	Mata Kuliah yang Diampuh	1. Asas-Asas Manajemen
		2. Teori dan Aplikasi Organisasi
		3. Teori Ilmu Administrasi Publik

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UNISMUH Makassar	UNHAS Makassar	UNM Makassar
Bidang Ilmu	Administrasi Negara	Administrasi Pembangunan	Administrasi Publik
Tahun masuk-lulus	1989-1993	1999-2003	2008-2014
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Takalar	Analisis Kemampuan Sumber Daya Aparat Pemda dalam	Budaya Organisasi dan Kinerja Pemerinta Daerah

		Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Takalar	Kabupaten Takalar
Nama Pembimbing/Promotor	Drs.belopadang, M.Si dan Abd. Kadir Adys, SH	Prof. Dr. H. Tahir Kasnawi, SU dan Drs. H. Achmad Batinggi, M.Si	Prof. Dr. H. Rahmat, M.Si, Prof. Dr. H. Syamsul Ridjal, M.Si dan Prof. Dr. H. Amiruddin Tawe, M.Si

### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp )
1	2011	Kinerja Bupati dalam Pembinaan PNS di Kabupaten Sidrap	Unismuh	3.000.000
2	2012	Pelayanan Pengurusan SIM di Polres Takalar	Unismuh	3.000.000
3	2013	TB Care Aisyiyah	Global Found	64.000.000

### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)

1	2014	Pembenahan Administrasi Aisyiyah di Kota Makassar	Universitas	7.000.000
2	2015	Rekonstruksi Paradigma Pemikiran Pendidikan Pedagang Jagung di Kabupaten Takalar	Dikti	47.000.000

**E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Characteristic of organizational culture in Takalar	Journal Research of Social Science and Management	Vol.3 No.7, November 2013

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Nama Temu ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Darul Arqam Dasar IMM	Kepemimpinan	2011 di Unismuh Makassar
2	Darul Arqam Dasar IMM	Politik Menurut Islam	2012 di Benteng Somba Opu
3	LKIM PENA	Paradigma Penelitian Kualitatif	2012 di Audit Al-Amin Unismuh Makassar

4	LKIM PENA	Paradigma Penelitian Kulitatif	2013 di Audit Al-Amin Unismuh Makassar
5	HUMANIERA	Organisasi Mahasiswa Melahirkan Sarjana Plus	2014 & 2015 di Balai Diklat SLB
6	Komunitas Mahasiswa Pro Good Governance FAI	Clean and Good Governance	2015 di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar

#### **G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Budaya Organisasi Pemerintahan	2015	169	Leutika, Yogyakarta

#### **H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				

#### **I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat

**J. Penghargaan dalam 10 tahun (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)**

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Alumni Berprestasi (S-1)	Universitas Muhammadiyah Makassar	1994
2	Alumni Doktor Pertama	Himpunan Jurusan Ilmu Administrasi Negara	2014

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat di pertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penugasan Penelitian Produk Terapan Tahun Anggaran 2017.

Makassar, 13 Desember 2016

Anggota Pengusul,



**Dr. Ihvani Malik, S.Sos, M.Si**

NIDN 0915057101

**LAMPIRAN 6 : SURAT PERNYATAAN KETUA PENGUSUL**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



Lampiran 6. Surat Pernyataan Ketua Peneliti

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si  
NBM/NIDN : 1031102/0905068000  
Pangkat/Golongann : Penata/IIIC  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Alamat : Komp.Griya Persada Manggarupi Blok B3  
No. 6 Sungguminasa

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul *Pengembangan Model Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik dalam Implementasi Program Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) melalui Bank sampah di Kota Makassar, yang diusulkan dalam skim Hibah Penelitian Produk Terapan tahun anggaran 2017 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/ sumber dana lain.*

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Makassar 13 Desember 2016

Mengetahui  
Ketua Lembaga Penelitian

**Ir. H.M. Amin Ishak, M.Sc**  
NIDN 0905068003

Yang Menyatakan



**Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si**  
NIDN 0905068003



Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221  
Telepon (0411) 866972, 881593, Faks (0411) 865588  
<http://www.unismuh.ac.id>





## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### Lampiran 5. Surat Pernyataan Ketua Peneliti

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si  
NBM/NIDN : 1031102/0905068003  
Pangkat/Golongan : Penata/IIIIC  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Alamat : Komp.Griya Persada Manggarupi Blok B3 No. 6  
Sungguminasa.

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul *Pengembangan Model Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik dalam Implementasi Program Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) melalui Bank sampah di Kota Makassar*, yang diusulkan dalam skim Hibah Bersaing tahun anggaran 2016 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.**

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Makassar, 07 April 2015

Mengetahui  
Ketua Lembaga Penelitian



Ir. H.M. Amin Ishak, M.Sc  
NIDN 0030054803



Yang menyatakan

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP M.Si  
NIDN.0905068003